

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KAB/KOTA PROVINSI
BANTEN
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi (S-1) Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



OLEH :

ADAM RIJALDI ABDILAH
NIM.5553170076

**KONSENTRASI EKONOMI PUBLIK
JURUSAN ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG BANTEN**

2024

LEMBAR PERNYATAAN

Adam Rijaldi Abdilah. 5553170076. Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul: -Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kab/kota Provinsi Banten. Saya tulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Skripsi yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah. Apabiladikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Serang,27
Februari 2024



**PERSETUJUAN PENGESAHAN
PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI**

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK
DAERAH DI KAB/KOTA PROVINSI BANTEN**

Telah diuji dalam sidang skripsi yang diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan dinyatakan **LULUS**
Pada hari Rabu, 27 Maret 2024 oleh Dewan Penguji.

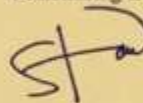
Serang, 24 Maret 2024

Pembimbing I



Sayifullah, SE., M.Akt
NIP. 198204222008121003

Pembimbing II



Stannia C. Sucl., SE., M.Si
NIP. 199104202019032020

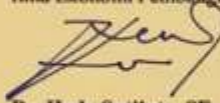
Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Tubagus Ismail, SE., MM., AK., CA., CMA., CPA
NIP. 197312302001121001


Ketua Jurusan
Ilmu Ekonomi Pembangunan



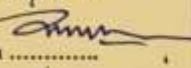
Dr. Hady Sutjipto, SE., M.Si
NIP. 197011052008121002

Dewan Penguji

Sayifullah, SE., M.Akt
NIP. 198204222008121003

Tanggal 15/3/24 Tanda Tangan 

Saharuddin Didu, STP., ME
NIP. 196308311988121001

Tanggal 08/3/24 Tanda Tangan 

Rah Adi F Ginanjar, SE., MT
NIP. 201601262098

Tanggal 8/3/24 Tanda Tangan 

Nama : Adam Rijaldi Abdilah
NIM : 5553170076
Jurusan : Ilmu Ekonomi Pembangunan
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“ Stop thinking inferior be superior”

“Apakah anda akan menduga akan sukses begitu saja ?, meraih apa yang anda harapkan.Sementara belum nampak pada diri anda di sisi allah, kesungguhan dan kesabaran.”

(QS. Al-imron : 142)

“Jika kamu tidak sanggup menahan lelah nya belajar maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan”

(imam al-syafi’i)

Persembahan

“alhamdulillahirobbil’alamin, Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bakti dan tanggun jawab kepada orang tua, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang, Do’a dan usaha terbaik untuk seluruh anak-anaknya, juga untuk keluarga dan teman-teman yang selalu aku bangakan dan cintai, semoga allah SWT balas kebaikan kalian. Semoga ilmu ini berkah dan menjadi amalan untuk menghantarkan kepada kebaikan.”

ABSTRAK

Dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari Jumlah Hotel, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Hotel sebagai faktor penentu Pajak Daerah di Kab/Kota Provinsi Banten. Penentuan sampel berdasarkan data *Crossection* yaitu 8 Kab/Kota Provinsi Banten, Kab Pandeglang, Kab Lebak, Kab Serang, Kab Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan dengan data *Time-series* yaitu tahun 2017-2021. Data penelitian ini didapat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis panel data dengan *fixed effect model* dipakai dalam penelitian ini yang bersifat kuantitatif. Hasil uji parsial (Uji-t) menunjukkan bahwa variabel Jumlah Hotel dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah. Sedangkan Inflasi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah Daerah. Selain itu, berdasarkan hasil simultan (Uji-F) menunjukkan bahwa Jumlah Hotel, Retribusi Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri secara simultan berpengaruh terhadap Pajak daerah di Kab/Kota Provinsi Banten tahun 2017 - 2021.

Kata kunci : Pajak Daerah, Jumlah Hotel, PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk, Jumlah Industri.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of Regional Number of Hotel , Gross Regional Domestic Product (GRDP), Inflation, Population and Number of Hotel as determinants of Own Source Revenue (PAD) in the districts/cities of Banten Province. Determination of the sample based on cross-sectional data, namely the 8 districts/cities of Banten Province covering the of Pandeglang district, Lebak district, Serang district, Tangerang district, Cilegon City, Tangerang City, Serang City, and South Tangerang City with Time-series data is 2017- 2021. The data for this research were obtained from the Directorate General of Fiscal Balance and the Central Statistics Agency (BPS). Panel data analysis method with fixed effect model is used in this research which is quantitative. The results of the partial test (t-test) show that the variables of Number of Hotels and Gross Regional Domestic Product have a significant effect on Own Regional Tax. Meanwhile, Inflation, population and number of Industries have no significant effect on Own Source Revenue. In addition, based on the simultaneous results (F-Test) it shows that Regional Taxes, Regional Retributions, Gross Regional Domestic Product and Domestic Investment simultaneously affect Regional Own Source Revenue in the Eastern Province of Indonesia in 2017 - 2021.

Keywords : *Regional Taxes, Number of Hotels, GRDP, Inflation, Population, Number Of Industries.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas karunia dan segala limpahan rahmat-Nya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan usulan proposal yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kab/Kot Di Provinsi BANTEN” dengan baik dan tepat waktu. Judul ini dipilih karena rasa ingin tahu penulis terhadap judul Dan usulan proposal ini di buat untuk memenuhi salah satu syarat untuk menulis skripsi.

Tulisan ini telah di susun secara maksimal dan penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu dalam penyusunan usulan penelitian ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan pengetahuan yang penulis miliki. Dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan saran, arahan, maupun kritikan yang konstruktif demi penyempurnaan hasil penelitian ini.

Tangerang, Februari 2024



Adam Rijaldi Abdilah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian	17
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1 Landasan Teori.....	19
2.2.1 Penerimaan Daerah	19
2.2.2 Pajak Daerah	22
2.2.3 Jumlah hotel	26
2.2.4 Pendapatan Perkapita	26
2.2.5 Inflasi	27
2.2.6 Jumlah Penduduk	28
2.2.7 Jumlah Industri.....	30
2.2 Studi Empiris	30
2.3 Krangka Pemikiran.....	40
2.4 Hipotesis Penelitian.....	42
2.5 Hubungan Antar Variabel	42
BAB III.....	46
METODE PENELITIAN.....	46
3.1 Objek Penelitian.....	46
3.2 Jenis dan Sumber Data	46
3.3 Variabel Penelitian dan Oprasionalisasi Variabel.....	46
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel.....	48
3.3 Metode Analisis Data	51
3.4 Uji Normalitas.....	55
3.5 Uji Asumsi Klasik	56
3.6 Uji Multikolinearitas	56
3.7 Uji Heterokedastisitas	56
3.8 Uji Autokorelasi.....	57

3.9 Hipotesis Statistik.....	58
1. Uji Statistik t (Uji Parsial)	58
2. Uji Statistik F (Uji Simultan)	60
BAB IV.....	62
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	62
4.1 Gambaran Umum Objek/Daerah Penelitian	62
4.2 Hasil Uji Hipotesis	70
4.3 Pembahasan.....	86
BAB V.....	91
KESIMPULAN DAN SARAN.....	91
5.1 Kesimpulan.....	91
5.2	
Saran.....	Error
! Bookmark not defined.	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak	5
Tabel 1.2 Jumlah Tamu	7
Tabel 1.3 Inflasi	10
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk	11
Tabel 1.5 Jumlah Perusahaan Industri	13
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	35
Tabel 2.3 Operasionalisasi Variabel	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.2 Uji Statistik Durbin-Watson d	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.1 Hasil Uji Chow	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.2 Hasil Uji Hausman	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.3 Hasil Estimasi Regresi Data Panel	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.4 Nilai Intersep (Konstanta) pada Kab atau Kota di Provinsi Banten	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.7 Hasil Estimasi Uji White – Heterokedastisitas	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.8 Hasil Pengujian Uji T-Statistik	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.9 Hasil Uji F-Statistik	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.10 Hasil Uji F-Statistik	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	41
Gambar 3. 1 Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 1 Perkembangan jumlah hotel	Error! Bookmark not defined.
Gambar 5. 1 Perkembangan PDRB	Error! Bookmark not defined.
Gambar 6. 1 Perkembangan Inflasi	Error! Bookmark not defined.
Gambar 7. 1 Perkembangan Jumlah Penduduk	Error! Bookmark not defined.
Gambar 8. 1 Perkembangan Jumlah Penduduk	Error! Bookmark not defined.
Gambar 9. 1 Hasil Daerah Pengujian Autokorelasi Metode Durbin-Watson.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

lampiran 1: data variable	96
Lampiran 2: Uji Chow	98
Lampiran 3: Uji Hausman	99
Lampiran 4 : Estimasi Model Panel	100
Lampiran 5 : Uji Normalitas	101

Lampiran 6 : Uji Asumsi Klasik.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional adalah kegiatan pembangunan masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik yang bersifat materiil maupun spiritual. Dalam rangka pembangunan nasional di Indonesia, pembangunan daerah yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional dengan tujuan untuk mengembangkan daerah yang semakin berat dan kompleks dalam menghadapi era globalisasi untuk meningkatkan kemampuan daerah tersebut. Pembangunan daerah merupakan usaha yang sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Otonomi daerah memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Kebijakan otonomi daerah secara resmi diperlakukan di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2001 oleh pemerintah pusat. Dengan munculnya otonomi daerah di Indonesia diperlakukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah diberi kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah memberikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dan mengeratkan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonominya.

Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus dilakukan secara profesional, efisien, transparan dan bertanggung jawab untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Otonomi daerah dan

desentralisasi fiskal saling berhubungan erat. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bertujuan agar pemerintah mampu menjalankan rumah tangganya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Komponen pendapatan daerah yang dapat diandalkan salah satunya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pajak merupakan salah satu sumber terbesar dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pajak daerah adalah pungutan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sesuai peraturan hukum dan perundang-undangan yang jelas dan kuat untuk membiayai pembangunan daerah. Peranan pajak daerah menjadi sangat penting dalam pembiayaan daerah yang dapat menjadi sumber pendanaan daerah dan penyangga utama dalam kegiatankegiatan daerahnya. Pajak daerah merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar. Dengan kontribusi pajak daerah yang semakin besar, maka akan semakin leluasa dalam memanfaatkan dana yang diperoleh dan akan menambah kepercayaan diri untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah dan pembangunan daerah serta semakin tinggi kualitas otonominya.

Salah satu faktor yang tidak kalah penting dari Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah. Pajak mempunyai fungsi krusial dalam mendanai kebutuhan negara dan diharapkan sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu penerimaan pajak daerah diharapkan kedepannya dapat memberikan peran yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam urusan pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. (Fitra, 2016)

Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah maka pajak harus memenuhi unsur keadilan, unsur kepastian, unsur kelayakan, efisien dan unsur ketepatan (Halim dan Iqbal, 2012). Menurut (Mardiasmo, 2011) pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dengan demikian pajak merupakan salah satu sumber dalam PAD. Jika pajak daerah mengalami peningkatan maka otomatis PAD pemerintah daerah akan semakin meningkat. Sebagai salah satu komponen dari PAD maka pemerintah daerah haruslah berupaya untuk meningkatkan pajak daerah. Guna meningkatkan pajak daerah maka pemerintah daerah perlu memperhatikan faktor yang berhubungan dengan peningkatan pajak daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pada pasal 1 angka 18 dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang biasa disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah diharuskan untuk lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan yang terlibat dengan hak-hak rakyatnya, atau dapat dikatakan pemerintah daerah dituntut harus adil melakukan dalam pemungutan pajak daerah kepada seluruh masyarakatnya. Selanjutnya pemerintah daerah juga diharuskan untuk mampu mengalokasikan hasil penerimaan pajak untuk menciptakan pembangunan dan menunjang keperluan pemerintahan daerah itu sendiri. Berikut ini merupakan Tabel Penerimaan Pajak daerah di Provinsi Pulau Jawa Tahun 2017-2021:

Tabel 1.1

Realisasi penerimaan pajak di Provinsi Pulau Jawa 2017-2021

(Miliar Rupiah)

No	Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021
1	Banten	5.487	6.329	7.022	5.906	5.679
2	Jawa Tengah	15.003	16.464	17.592	16.380	17.391
3	Jawa Timur	23.077	24.425	25.484	23.263	25.257
4	DKI Jakarta	36.500	37.538	40.298	31.895	34.575
5	DIY Yogyakarta	2.794	3.014	3.211	2.823	2.932
6	Jawa Barat	28.559	30.915	33.954,58	29.637	33.158

Sumber : DJPK Kemenkeu, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2017-2021

Berdasarkan pada Tabel 1.1 memperlihatkan realisasi penerimaan pajak daerah di Provinsi Pulau Jawa Secara umum, realisasi penerimaan pajak di Provinsi Pulau Jawa 2017-2021 mengalami peningkatan pada setiap daerah. Namun berbeda dengan daerah Banten pada 2 tahun terakhir dengan tingkat penurunan dari 2020 dan 2021 Total sebesar 208 Miliar Rupiah mengalami penurunan realisasi penerimaan pajak.

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kab/Kota Provinsi Banten 2017-2021 (juta rupiah)

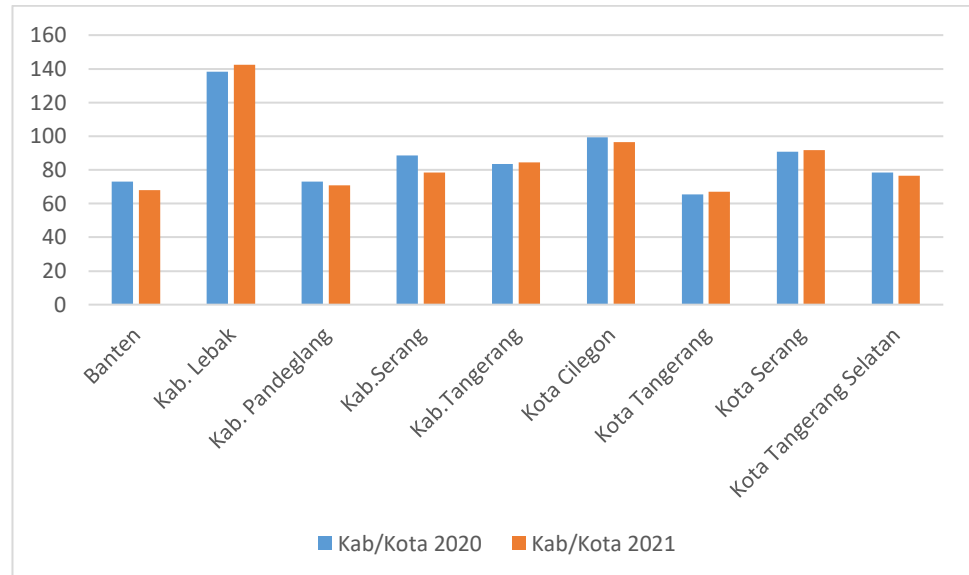
No	Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab lebak	73,39	86,97	100,74	119,25	156,92
2	Kab Pandeglan	77,88	47,07	54,70	37,22	35,00
3	Kab Serang	337,25	379,05	381,73	378,84	331,06
4	Kab Tangerang	1.386,70	1.915,26	2.153,66	1.701,90	2.056,96
5	Kota Cilegon	455,92	429,23	488,73	564,09	485,25
6	Kota Tangerang	1.566,51	1.551,44	1.760,35	1.364,32	1.489,54
7	Kota Serang	117,70	128,68	143,98	139,18	140,76
8	Kota Tangerang selatan	1.330,05	1.422,94	1.603,17	1.345,14	1.223,11

Sumber : DJPK Kemenkeu, Statistik Keuangan Pemerintah kab/kota Provinsi 2017-2021

Berdasarkan pada Tabel 1.2 memperlihatkan realisasi penerimaan pajak daerah di Provinsi Banten berdasarkan kab/kota, realisasi penerimaan pajak di kab/kota provinsi Banten 2017-2021, Berdasarkan tabel di atas menjelaskan dari data tersebut setiap daerah dengan mengitung jumlah total mengalami penurunan sebesar 1,788 Juta Rupiah pada tahun 2020 dan 2021 pada penerimaan pajak.

Gambar 1.3

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kab/Kota Lingkup Provinsi Banten Triwulan II-2021 (persen)



Sumber : DJPK Kemenkeu, Statistik Keuangan Pemerintah kab/kota Provinsi 2020-2021

Realisasi penerimaan pajak daerah di wilayah Banten triwulan II-2021 Rp5,6 triliun atau negative 2,30 persen dari target. Dibandingkan dengan triwulan I-2021 (q-t-q) mengalami penurunan sebesar 3,69 persen. Pertumbuhan penerimaan pajak daerah tertinggi di catat di Kab Lebak sebesar 4,15 persen, diikuti Kab Tangerang persen , Kota Tangerang, Kota Serang, 1,40 persen, 2,33 persen, 1,76 persen. Sedangkan Kota Tangsel, Kab.Pandeglang , Kab.Serang, Kota Cilegon, mengalami pertumbuhan negatif 5,65 persen, 2,77 persen, 10,22 persen, 3,04 persen. Penerimaan pajak daerah triwulan II-2021 dibanding periode yang sama tahun 2020 tumbuh negative 5,99 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh penurunan di beberapa wilayah di Banten.

Ada pun di beberapa tahun dan di Daerah penerimaan pajak daerah mengalami penurunan dikarenakan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak menurun

dikarnakan banyak faktor, salah satu faktor yang sangat berpengaruh yaitu pandemic Covid 19.

Faktor yang dapat berhubungan dengan peningkatan pajak daerah adalah jumlah hotel. Keberadaan rumah penginapan/hotel yang terdapat di Kota Yogyakarta memberikan keuntungan bagi Pemerintah Daerah, yaitu melalui penerimaan Pajak Hotel. Adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengenaan pajak kepada pengguna jasa hotel maka dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah di Jawa Timur. Jika jumlah hotel bertambah dengan sendirinya akan dapat meningkatkan penerimaan Pajak daerah melalui pajak hotel (Aliandi dan Handayani, 2013). Hasil kajian yang dilakukan oleh (Dwi et al., 2013) membuktikan jika jumlah hotel berdampak positif terhadap penerimaan pajak. Sementara itu hasil penelitian yang dilakukan oleh (Handayani dan Aliandi, 2013). membuktikan jika jumlah hotel berdampak negatif terhadap penerimaan pajak, namun tidak signifikan.

Jumlah tamu domestic pada usaha akomodasi menurut klasifikasi hotel dan Kab/Kota di provinsi banten dalam periode 2017-2021 mengalami kenaikan setiap tahunnya yang di jelaskan pada Tabel 2.1. Berdasarkan data yang ditemukan Kab.Pandeglang,Kab Lebak, Kab Tangerang dan di susul beberapa 4 Kab/kota lainnya yang mengalami kenaikan dari Jumlah Tamu Pada setiap tahunnya, Akan membawa dampak positif bagi penerimaan pajak di provinsi Banten.

Tabel 2. 1Jumlah Tamu Domestik pada usaha akomodasi menurut klasifikasi hotel (Ribuan orang)

No	Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab Pandeglang	180.750	224.610	288.220	104.930	157.340
2	Kab Lebak	202.090	142.030	541.230	162.390	236.650
3	Kab Tangerang	459.920	503.580	6.930	3.690	5.230

4	Kab Serang	458.340	375.690	9.160	3.460	7.450
5	Kota Tangerang	123,474	122,666	214,024	118,656	123,423
6	Kota Cilegon	252.750	221.210	470.160	260.470	293.240
7	Kota Serang	547.980	348.870	6.820	2.830	4.320
8	Kota Tangerang Selatan	737.780	661.360	302.690	126.380	234.210

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017-2021, Statistik Indonesia

Ada beberapa faktor lainnya yang bisa mempengaruhi penerimaan pajak yaitu PDRB Berdasarkan jurnal yang saya baca sebagai acuan sebagai berikut.

Faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan pajak daerah lainnya adalah pendapatan perkapita. Pendapatan per kapita menurut (Sukirno, 2004). adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara/daerah pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Semakin tinggi pendapatan per kapita sebuah negara atau daerah menurut (Ausri, 2007:41) tertentu semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya dan sebaliknya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Digdaya, 2015) dan penelitian yang dilakukan oleh (Rakiman, 2013). serta penelitian yang dilakukan oleh (Sasana, 2013). yang membuktikan jika pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Jadi dengan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat di Jawa Timur akan dapat meningkatkan pajak daerah di Jawa Timur.

Semakin tinggi Pdrb akan mempengaruhi penerimaan masyarakat dan dampaknya akan kemampuan masyarakat untuk bayar pajak dan meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Tabel 2.2 PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2017-2021

(Juta Rupiah)

No	Kab/kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Pandeglang	17 866 428,41	18 812 931,91	19 644 125,08	19 541 487,52	20 127 757,18
2	Kab. Lebak	18 683 739,21	19 735 870,92	20 810 486,83	20 610 989,12	21 245 043,09
3	Kab. Tangerang	86 964 026,88	92 011 405,21	97 129 166,45	93 482 489,21	97 809 902,21
4	Kab. Serang	49 154 636,22	51 754 319,98	54 347 487,78	53 055 563,37	54 992 522,18
5	Kota Tangerang	101 24 679,40	106 283 617,41	110 556 398,12	102 898 229,12	106 705 226,94
6	Kota Serang	66 444 529,41	21 482 093,45	22 813 096,37	22 517 968,53	23 374 085,22
7	Kota Cilegon	20 153 022,87	70 502 082,41	74 228 640,69	73 534 471,04	77 071 367,51
8	Kota Tangerang Selatan	52 098 555,90	55 999 106,77	60 137 014,46	59 525 500,40	62 364 157,61
9	Jumlah	412 639 618,30	436 581 428,06	459 666 415,79	445 166 698,32	463 690 061,95

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017-2021, Statistik Indonesia

Pada Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa secara garis besar perkembangan produk domestik regional bruto di 8 Kab/kota Provinsi Banten pada tahun 2017-2021 mengalami peningkatan pada setiap kab/kota, jumlah total pdrb banten di 2 tahun terakhir mengalami pada 2021 sebesar 463,690.06 juta rupiah naik 18,523,39 dari tahun sebelumnya 2020.

Inflasi yang terjadi di suatu negara dapat mempengaruhi jumlah penerimaan di sektor pajak. Salah satu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan output yang cepat adalah dengan melakukan pembangunan untuk mengatasi pengangguran besar-besaran dan penggunaan modal yang sangat rendah. Namun hal tersebut ternyata tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Dalam keadaan demikian,

dapat dijumpai kenaikan harga yang diperkirakan merupakan kebijakan fiskal yang cermat untuk menghindari inflasi. Maka dapat disimpulkan bahwa inflasi memiliki pengaruh negative terhadap penerimaan pajak. Pada kondisi seperti ini, pemerintah cenderung memutuskan untuk menyerap kenaikan output tanpa menaikkan pajak, yang dapat menyebabkan permintaan agregat meningkat (inflasi akibat permintaan) (Wantara, 1997).

Kenaikan biaya secara tiba-tiba akan mendorong kenaikan harga apabila didukung oleh perluasan pemerintah. Apabila tidak diambil kebijakan segera untuk mengatasi hal tersebut, maka akan timbul kebutuhan akan kenaikan upah untuk mengimbangi biaya (inflasi akibat penawaran).

Ketersediaan barang dan jasa. Jika harga barang dan jasa mengalami kenaikan terus menerus akan menyebabkan inflasi. Hal ini akan berdampak langsung pada kondisi perekonomian dan dapat menurunkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Saputra, Sudjana dan Djudi 2014). Melihat hal ini pemerintah diharapkan dapat menjaga kestabilan perekonomian dengan menjaga inflasi pada tingkat yang rendah agar penerimaan pajak daerah dapat optimal.

Tabel 3.1 Inflasi tahun ke tahun Kab/kota di Provinsi Banten 2017-2021

(Persen)

Kab/kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kab Pandeglang	3,98	3,42	3,30	1,45	1,45
Kab Lebak	3,97	3,42	3,30	1,45	1,45
Kab Tangerang	3,96	3,42	3,20	1,45	1,45
Kab Serang	3,98	3,41	3,30	1,45	1,45
Kota Tangerang	3,98	3,41	3,30	1,45	1,45
Kota Cilegon	3,98	3,42	3,30	1,45	1,45
Kota Serang	3,98	3,42	3,30	1,44	1,45
Kota Tangerang Selatan	3,98	3,42	3,30	1,43	1,45

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017-2021, Statistik Indonesia

Tabel 3.1 Menunjukkan bahwa pergerakan inflasi di kawasan Banten dapat dilihat secara data keseluruhan dari tahun 2017-2021 menunjukkan data inflasi cenderung stabil, inflasi pada level ini juga menggambarkan keberlanjutan pemulihan sisi permintaan, terutama akibat perbaikan daya beli masyarakat.

Perkembangan jumlah penduduk juga dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, karena seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk pada suatu daerah maka dapat berpotensi meningkatkan jumlah wajib pajak sehingga nantinya penerimaan pajak juga akan meningkat. Sehingga dengan bertambahnya jumlah penduduk akan berdampak langsung pada penerimaan pajak daerah (Saputra, Sudjana dan Djudi 2014)

Walaupun jumlah penduduk terus meningkat selama sepuluh tahun mendatang, pertumbuhan penduduk Provinsi Banten menunjukkan kecenderungan terus meningkat. Dalam periode 2017-2021,

Turunnya laju pertumbuhan ini ditentukan oleh tingkat kelahiran, kematian dan migrasi. Pertumbuhan penduduk tertinggi di Provinsi Banten adalah di Kota Tangerang Selatan. Laju pertumbuhan penduduk Kab Tangerang mencapai 28.80 persen pada tahun 2017 menjadi 27.31 persen pada tahun 2021. jumlah penduduk menurut kab/kota di banten.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 2017-2021

(ribuan jiwa)

No	Kabupaten/kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab Pandeglang	1,205,203	1,209,011	1,211,909	1,272,687	1,288,314
2	Kab Lebak	1,288,103	1,295,810	1,302,608	1,386,793	1,407,857
3	Kab Tangerang	3,584,770	3,692,693	3,800,787	3,245,619	3,293,533
4	Kab Serang	1,493,591	1,501,501	1,508,397	1,622,630	1,647,790

No	Kabupaten/kota	2017	2018	2019	2020	2021
5	Kota Tangerang	2,139,891	2,185,304	2,229,901	1,895,486	1,911,914
6	Kota Cilegon	425,103	431,305	437,205	434,896	441,761
7	Kota Serang	666,600	677,804	688,603	692,101	704,618
8	Kota Tangerang Selatan	1,644,899	1,696,308	1,747,906	1,354,350	1,365,688

Banten.bps.go.id

Jumlah industri besar dan sedang Jumlah industri besar dan sedang adalah jumlah bidang mata pencaharian yang menggunakan ketrampilan dan ketekunan kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi dan distribusinya sebagai dasarnya. Maka industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan sehari - sehari yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan dan pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah. Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya, dan politik. Sehingga dalam hal ini industri memiliki peran sebagai pengelola bahan – bahan baku yang di hasilkan dari sektor – sektor ekonomi guna memberikan added value terhadap bahan baku tersebut.

Jumlah industri adalah jumlah unit usaha industri besar. Jumlah industri merupakan salah satu faktor positif pemicu pertumbuhan ekonomi ketika jumlah industri meningkat tentu untuk bisa memasarkan produk tersebut di tengah masyarakat perlu menggunakan media reklame untuk memperkenalkannya. Menurut (Sutrisno, 2002) jumlah industri berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame.

Penilaian tersebut sesuai dengan penilaian yang dilakukan bahwa sebagian besar pemerintah daerah tingkat II (sekarang Kabupaten/Kota) menarik pajak atas benda papan reklame di daerah. Pajak ini cocok untuk sumber penerimaan daerah, karena tempat objek pajak dapat mudah diketahui. Jumlah industri yang

menggunakan jasa pemasangan reklame juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Hal ini disebabkan apabila suatu industri yang ingin memasarkan produknya dapat menggunakan atau memasang reklame agar dapat diketahui oleh masyarakat. Hal tersebut dapat menambah jumlah penerimaan pajak itu sendiri. Bertambahnya jumlah industri yang memasang reklame mengakibatkan obyek pajak bertambah luas, sehingga penerimaan daerah pun meningkat (Syuhada Sofian, 1997).

Berdasarkan Tabel 5.1 dilihat bahwa Jumlah Industri dari kab/kota di provinsi Banten mengalami penurunan pada beberapa daerah dan mengalami kenaikan pada beberapa daerah yaitu Kota Tangerang selatan, Kota Tangerang dan Kab Tangerang, yang mana ada kenaikan jumlah industri sedang dan besar hal ini akan membawa pengaruh positif pada Penerimaan Pajak Daerah.

Tabel 5. 1 Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 2017-2021

(Satuan)

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab Pandeglang	10	9	10	10	9
2	Kab Lebak	27	26	29	28	27
3	Kab Tangerang	1.137	1.131	1.353	1.134	1.214
4	Kab Serang	245	236	309	310	308
5	Kota Tangerang	776	731	941	886	898
6	Kota Cilegon	95.00	86.00	103.00	102.00	98
7	Kota Serang	40	31	37	36	34
8	Kota Tangerang Selatan	185	180	140	140	170

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017-2021, Statistik Indonesia

Otonomi daerah memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Kebijakan otonomi daerah secara resmi diperlakukan di Indonesia sejak tanggal 1

januari 2001 oleh pemerintah pusat. Dengan munculnya otonomi daerah di Indonesia diperlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan diperbaharui menjadi Undang-, Pajak merupakan salah satu sumber terbesar dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pajak daerah adalah pungutan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sesuai peraturan hukum dan perundang-undangan yang jelas dan kuat untuk membiayai pembangunan daerah. Peranan pajak daerah menjadi sangat penting dalam pembiayaan daerah yang dapat menjadi sumber pendanaan daerah dan penyangga utama dalam kegiatankegiatan daerahnya. Pajak daerah merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar. Dengan kontribusi pajak daerah yang semakin besar, maka akan semakin leluasa dalam memanfaatkan dana yang diperoleh dan akan menambah kepercayaan diri untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah dan pembangunan daerah serta semakin tinggi kualitas otonominya.

Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah diberi kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang No. 1 Tahun 2022 Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. UU ini mengatur mengenai lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meliputi: 1) pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi; 2) pengelolaan Transfer ke Daerah/TKD; 3) pengelolaan belanja daerah; 4) pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah; dan 5) pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, penyederhanaan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Retribusi

diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-daerah, pengelolaan TKD mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin.

Faktor yang dapat berhubungan dengan peningkatan pajak daerah adalah jumlah hotel. Keberadaan rumah penginapan/hotel yang terdapat di Kota Yogyakarta memberikan keuntungan bagi Pemerintah Daerah, yaitu melalui penerimaan Pajak Hotel. Adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengenaan pajak kepada pengguna jasa hotel maka dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah di Jawa Timur. Jika jumlah hotel bertambah dengan sendirinya akan dapat meningkatkan penerimaan Pajak daerah melalui pajak hotel (Dwi et al., 2013). Hasil kajian yang dilakukan oleh (Wulandari dkk, 2013) membuktikan jika jumlah hotel berdampak positif terhadap penerimaan pajak.

Faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan pajak daerah lainnya adalah pendapatan perkapita. Pendapatan per kapita menurut (Sukirno, 2004) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara/daerah pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu.

Inflasi yang terjadi di suatu negara dapat mempengaruhi jumlah penerimaan di sektor pajak. Salah satu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan output yang cepat adalah dengan melakukan pembangunan untuk mengatasi pengangguran besar-besaran dan penggunaan modal yang sangat rendah. Namun hal tersebut ternyata tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Dalam keadaan demikian, dapat dijumpai kenaikan harga yang diperkirakan merupakan kebijakan fiskal yang

cermat untuk menghindari inflasi. Maka dapat disimpulkan bahwa inflasi memiliki pengaruh negative terhadap penerimaan pajak. Pada kondisi seperti ini, pemerintah cenderung memutuskan untuk menyerap kenaikan output tanpa menaikkan pajak, yang dapat menyebabkan permintaan agregat meningkat (inflasi akibat permintaan) (Wantara, 1997).

Perkembangan jumlah penduduk juga dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, karena seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk pada suatu daerah maka dapat berpotensi meningkatkan jumlah wajib pajak sehingga nantinya penerimaan pajak juga akan meningkat. Sehingga dengan bertambahnya jumlah penduduk akan berdampak langsung pada penerimaan pajak daerah (Saputra, Sudjana dan Djudi 2014)

Jumlah industri adalah jumlah unit usaha industri besar. Jumlah industri merupakan salah satu faktor positif pemicu pertumbuhan ekonomi ketika jumlah industri meningkat tentu untuk bisa memasarkan produk tersebut di tengah masyarakat perlu menggunakan media reklame untuk memperkenalkannya. Menurut (Sutrisno, 2002) jumlah industri berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame.

Dari uraian di atas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Analisis yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kab/Kota di Provinsi Banten”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka dapat diambil pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh jumlah hotel terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2017-2021?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2017-2021?
3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di provinsi Banten tahun 2017-2021?

4. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di provinsi Banten tahun 2017-2021?
5. Bagaimana pengaruh jumlah industri terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh jumlah hotel terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2017-2021.
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2017-2021.
3. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Inflasi terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di provinsi Banten tahun 2017-2021.
4. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota provinsi Banten tahun 2017-2021.
5. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Jumlah industri dan pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di provinsi Banten tahun 2017- 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat untuk berbagai pihak :

- a. Kepentingan akademis, memberikan tambahan informasi dalam wacana akademik yang berkaitan dalam ilmu ekonomi khususnya ilmu ekonomi publik sehingga dapat dijadikan masukan, referensi serta perkembangan penelitian sejenis di masa yang akan datang.
- b. Kepentingan Praktis, diharapkan dapat membantu pihak-pihak perumus ataupun bagi para pengambil keputusan di pemerintahan yang berhubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.

- c. Untuk penulis, sebagai salah satu media latihan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan sesuai disiplin ilmu yang dipelajari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.2.1 Penerimaan Daerah

Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2014, bahwa untuk dapat memiliki keuangan yang memadai, daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini daerah dapat memperolehnya dengan beberapa cara, diantaranya :

1. Dapat mengumpulkan pajak daerah yang telah disetujui pemerintah pusat
2. Melakukan pinjaman
3. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak negara yang dipungut di daerah
4. Menambah tarif pajak negara tersebut
5. Menerima bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat Menurut Nurcholis

(2007:182) sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Anggraini dan Puranata (2010) besar kecilnya PAD akan mempengaruhi otonomi daerah dalam melaksanakan kebijakannya, semakin besar PAD maka kemampuan daerah akan lebih besar dan ketergantungan dengan pemerintah atasan semakin berkurang. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah, dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Objek PAD antara lain untuk provinsi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, retribusi pelayanan kesehatan dan lain-lain.

Menurut (Rahayu, 2002) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu hal yang erat kaitannya dengan otonomi daerah yaitu kewenangan daerah otonom untuk pemerintahan. Peranan PAD dalam keuangan daerah merupakan salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab di lingkungannya masing-masing. Semakin

besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar pula tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan yang bersifat mandiri, dan semakin besar pula kekuasaan daerah yang bersangkutan untuk mengarahkan penggunaan keuangan sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan skala prioritas daerah yang bersangkutan. Berdasarkan pasal 40 UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dijelaskan, sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1) Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah memiliki peran ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai alat pengatur. Sebagai pendapatan pajak daerah, setiap pajak harus memenuhi unsur keadilan, unsur kepastian, unsur kelayakan, efisien dan unsur ketepatan (Halim dan Iqbal, 2012). Menurut (Mardiasmo, 2011) mengatakan pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2) Hasil Retribusi Daerah

Menurut (Siahaan, 2010) retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepala negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan Negara bagi penduduknya secara perorangan. Menurut (Darise, 2009) retribusi daerah dikelompokkan ke dalam tiga jenis yaitu pertama retribusi jasa umum yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Kedua adalah retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Ketiga retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(Aji Dkk, 2015) menyebutkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dinyatakan dalam UU No 23 Tahun 2014 mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta. Sementara (Aji Dkk, 2015) menyebutkan bahwa dalam pasal 285 UU No 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah dan komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan menurut (Darise, 2009) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan antara Pemerintah Daerah. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus

1) Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil menurut (Darise, 2009) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan

angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut (Nordiawan Dkk, 2008) Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana alokasi Umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan- kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim, 2009)

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut (Darise, 2009) adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional.

2.2.2 Pajak Daerah

A. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sementara itu menurut (Siahaan, 2001) pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipakasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Adapun menurut (Adisasmita, 2011) pajak daerah merupakan kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memeberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum. Sementara itu menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 tahun 2017 pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian di atas maka penyusun menyimpulkan jika pajak daerah merupakan iuran yang diberbankan kepada orang atau badan yang dapat dipaksakan. Jadi pajak merupakan kewajiban yang bersifat memaksa dan merupakan salah satu sumber pendapatan dalam pembangunan daerah yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

B. Fungsi Pajak

Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah pajak menurut (Sari, 2013) memiliki dua fungsi yaitu sebagai fungsi penerimaan dan fungsi mengatur. Pajak sebagai fungsi penerimaan karena pajak merupakan sumber pemasukan dalam kas negara atau daerah dengan tujuan membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sementara itu sebagai fungsi pengatur pajak dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidang keuangan (bidang ekonomi,politik,budaya,pertahanan,keamanan).

C. Tarif Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2011) ada empat jenis tarif yang diberbankan kepada masyarakat yaitu:

- a. Tarif proporsional merupakan tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
- b. Tarif tetap, yaitu tarif yang berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- c. Tarif progresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- d. Tarif regresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

D. Jenis Pajak

Pajak Daerah menurut Peraturan UU Nomor 28 tahun 2009 terdiri dari lima) jenis yaitu sebagai berikut:

a. Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Kendaraan

Bermotor atau PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat- alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat

perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair, gas dan padat yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Setiap penyediaan dan/atau penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air dipungut PBBKB.

Pembelian bahan bakar yang dilakukan oleh industri usaha pertambangan, kehutanan, transportasi dan kontraktor jalan yang digunakan untuk operasional kendaraan bermotor dipungut PBBKB sebesar :

- 1) Untuk sector industri di pungut sebesar 17,17% (Tujug belas koma tujuh belas persen) dari jumlah bahan bakar.
- 2) Untuk usaha perdagangan dan usaha kehutanan, perkebunan dipungut sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari jumlah pembelian bahan bakar.
- 3) Untuk usaha transportasi dan kontraktor jalan dipungut sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pembelian bahan bakar.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik 24 yang berada di laut maupun di darat. Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan di daerah dipungut PAP. Pungutan PAP dikecualikan untuk pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan bagi keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

e. Pajak Rokok.

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Setiap cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah dikenakan Pajak Rokok. Rokok meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Dikecualikan dari objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

2.2.3 Jumlah hotel

Hotel memegang peran penting dalam industri pariwisata, hal dikarenakan tidak sedikit orang enggan mengunjungi daerah wisata karena ketiadaan sarana hotel yang memadai. Hotel menurut (Bataafi, 2005) merupakan jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian ataupun seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

Berkaitan dengan jumlah hotel maka dapat diartikan banyaknya jumlah akomodasi yang digunakan untuk menginap yang dikelola secara komersil. Berkaitan dengan penerimaan pajak maka sedikit banyaknya jumlah hotel dapat menentukan besar kecilnya penerimaan pajak daerah. Hal ini disebabkan karena jumlah penerimaan pajak hotel ditentukan dari besar tarif pajak yaitu 10% dari total pendapatan hotel. Jadi semakin banyak jumlah hotel maka dapat semakin banyak menarik minat masyarakat untuk menginap dan akan semakin banyak pula pajak yang disetorkan kepada pemerintah.

2.2.4 Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita menurut (Sukirno, 2004) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara/daerah pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Semakin tinggi pendapatan per kapita sebuah negara atau daerah menurut (Ausri, 2007;41) tertentu semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya dan sebaliknya.

Manfaat menghitung pendapatan per kapita secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat mengetahui tingkat perekonomian suatu negara/daerah, jika pendapatan per kapita tinggi berarti perekonomian sudah maju, demikian pula sebaliknya.
- 2) Dapat mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara/daerah jika pendapatan per kapita riil tinggi berarti kemakmuran suatu negara sudah tinggi demikian pula sebaliknya.
- 3) Dapat melihat perkembangan perekonomian dan kemakmuran suatu daerah/negara, dengan cara membandingkan besarnya pendapatan per kapita dari tahun ke tahun.
- 4) Dapat membandingkan tingkat kemakmuran (standar hidup) antar negara/daerah, apakah tergolong kelompok rendah, menengah, atau tinggi;
- 5) Dapat digunakan sebagai pedoman pengambilan kebijakan ekonomi bagi pemerintah daerah/negara.
- 6) Dapat memberikan data-data mengenai kependudukan, seperti jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun, dan penyebaran penduduk dari tiap daerah.

Ada dua cara untuk menghitung pendapatan per kapita yaitu sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan harga yang sedang berlaku dan berdasarkan harga tetap (konstan). Jika kita menghitung berdasarkan harga yang berlaku maka hasilnya disebut pendapatan per kapita nominal. Pendapatan per kapita nominal merupakan pendapatan per kapita yang tidak memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau inflasi.
- 2) Berdasarkan harga tetap (konstan), hasilnya disebut pendapatan per kapita riil. Pendapatan per kapita riil merupakan pendapatan per kapita yang sudah memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau inflasi.

2.2.5 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan suatu harga secara umum yang terjadi terus menerus (Curatman, 2010). Inflasi menjadi masalah karena hal ini menyayatkan daya beli

masyarakat suatu negara. Jika harga umum mengalami kenaikan (inflasi) tetapi tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan per kapita, maka jelas daya beli masyarakat menjadi sangat kurang.

Inflasi dapat dirumuskan sebagai kenaikan harga umum, yang bersumber pada terganggunya keseimbangan antara arus uang dan arus barang (Gilarso, 2004). Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus (Nopirin, 2016). Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan

Dampak Inflasi Dampak buruk dari inflasi ditinjau dari tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai berikut (Murni, 2016):

1. Inflasi akan menurunkan pendapatan riil yang diterima masyarakat, dan ini sangat merugikan orang-orang yang berpenghasilan tetap. Pada saat inflasi, kenaikan tingkat upah tidak secepat kenaikan harga barang yang diperlukan dan dijual dipasar.
2. Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Seperti tabungan masyarakat di bank nilai riilnya akan menurun.
3. Inflasi akan memperburuk pembagian kekayaan. Tetapi bagi masyarakat yang menyimpan kekayaan dalam bentuk tanah dan rumah akan terjadi peningkatan kekayaan, baik secara riil maupun secara nominal. Demikian pula bagi pedagang, pendapatan riil mereka akan dapat bertahan dan mungkin meningkat pada saat terjadi inflasi.

2.2.6 Jumlah Penduduk

Penduduk memiliki peran serta dalam mengoptimalkan segala bentuk kegiatan ekonomi di masyarakat, karena itu penduduk merupakan pelaku dari setiap kegiatan yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu penduduk sangat berperan dalam pembangunan terutama dalam hal ini yang berkenaan dengan pajak daerah, jumlah penduduk sangatlah berperan aktif dalam menopang penerimaan pajak karena

penduduk adalah merupakan wajib pajak. Sehingga asumsi nya ketika jumlah penduduk meningkat juga akan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Di bawah ini adalah data jumlah penduduk berikut pertambahan setiap tahunnya.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, serta meningkatnya pembangunan restoran, maka akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah. Suatu daerah diharapkan mampu dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah. (Devas, 1989) Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan dalam hal ini, maka pemerintah daerah Kota Manado dapat memenuhi kebutuhan daerahnya dengan Cara meningkatkan pajak daerah, khususnya dari Pajak Restoran. Berikut dapat kita lihat perkembangan realisasi penerimaan pajak restoran, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita masyarakat Kota Manado Tahun 2005-2014.

Jumlah penduduk adalah banyaknya penduduk yang tinggal/menetap di suatu daerah/wilayah tertentu, yang diukur dalam satuan jiwa pertahun. Jumlah penduduk menurut teori Hansen mengenai stagnasi (seculer stagnation) dalam (Devas, 1989) yang menyatakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk justru akan menciptakan atau memperbesar permintaan agregatif.

Perkembangan jumlah penduduk juga dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, karena seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk pada suatu daerah maka dapat berpotensi meningkatkan jumlah wajib pajak sehingga nantinya penerimaan pajak juga akan meningkat. Sehingga dengan bertambahnya jumlah penduduk akan berdampak langsung pada penerimaan pajak daerah (Saputra, Sudjana, Djudi 2014)

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pajak daerah di antaranya adalah jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Inflasi. Semua faktor tersebut selalu berfluktuasi tiap tahunnya dan dapat digunakan sebagai peramalan untuk mengetahui penerimaan pajak daerah (Arianto, 2014).

2.2.7 Jumlah Industri

Jumlah industri adalah jumlah seluruh industri kecil dan industri besar yang mana industri merupakan salah satu faktor positif pemicu pertumbuhan ekonomi ketika jumlah industri mulai meningkat tentu perusahaan tersebut perlu memasarkan produk tersebut di tengah masyarakat dengan menggunakan media reklame untuk memperkenalkannya. Menurut (Sutrisno, 2002) jumlah industri berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Penilaian tersebut sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh (Devas Dkk, 1989) bahwa sebagian besar pemerintah daerah tingkat II (sekarang Kabupaten/Kota) menarik pajak atas benda papan reklame di daerah. Karena pajak reklame ini cocok untuk sumber penerimaan daerah, karena tempat objek pajak dapat mudah diketahui. Jumlah industri yang menggunakan jasa pemasangan reklame juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Hal ini disebabkan apabila suatu industri yang ingin memasarkan produknya dapat menggunakan atau memasang reklame agar dapat diketahui oleh masyarakat. Hal tersebut dapat menambah jumlah penerimaan pajak itu sendiri. Bertambahnya jumlah industri yang memasang reklame mengakibatkan obyek pajak bertambah luas, sehingga penerimaan daerah pun meningkat (Sofian Sofian 1997).

2.2 Studi Empiris

Studi empiris dapat didefinisikan sebagai sebuah ilmu yang berlandaskan atas pengalaman indrawi. Pengalaman indrawi yang dimaksud adalah berbagai pengalaman penglihatan, pengecapan, penciuman, pendengaran, serta sentuhan pada sesuatu yang pernah diteliti oleh seseorang maupun beberapa orang, Maka dengan begitu dapat dikatakan bahwa landasan empiris adalah acuan yang didapat dari hasil penelitian terdahulu yang menyatakan beberapa konsep yang relevan serta saling bertaut dengan variabel-variabel yang hendak dikaji. Adapun yang menjadi landasan empiris atau penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan untuk proposal ini adalah sebagaimana berikut :

Tabel 1.1

Undang-undang tentang otonomi daerah dan iuran pajak

No	Ketentuan	Tema	Menjelaskan
1	UU 23 Tahun 2014	Otonomi daerah dan Pemerintah Daerah	<p>1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur</p>

No	Ketentuan	Tema	Menjelaskan
			<p>penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p>
2	<p>PP Nomer 35 Tahun 2023</p>	<p>Pajak Daerah Dan Retribusi daerah</p>	<p>Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>
3.	<p>Pasal 47 UU No 28 Tahun 2009</p>	<p>Tentang Pajak Reklame</p>	<p>(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; b. Reklame kain; c. Reklame melekat, stiker; d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame</p>

No	Ketentuan	Tema	Menjelaskan
			<p>apung; h. Reklame suara; i. Reklame film/slide; dan j. Reklame peragaan. (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah: a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya</p>
4	<p>Pasal 33 UU No 28 Tahun 2009</p>	Subjek Pajak Hotel	<p>(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.</p> <p>(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas</p>

No	Ketentuan	Tema	Menjelaskan
			<p>sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.</p> <p>(3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.</p>

Tabel 1.2

Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variable dan metode analisis	Hasil penelitian
1	(Puspita Suci Arianto dan Yazid Yud Padmono, (2014)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Surabaya.	Dependen: Y: Pajak Daerah Independen: X1:Jumlah Penduduk X2:Jumlah Hotel X3: Jumlah Industri	X1:Positif dan Signifikan X2:Positif dan Signifikan X3:Positif dan Signifikan
2	(Yohan Dwi Arta, 2016)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember.	Dependen: Y: Pajak Daerah Independen: X1:Jumlah Penduduk X2:Jumlah Hotel X3:Jumlah Industri	X1:Positif dan Signifikan X2:Positif dan Signifikan X3: Positif dan Signifikan
3	(Susilo, n.d.)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah	Dependen: Y: Pajak Daerah Independen: X1 : PDRB X2: Inflasi	X1:Positif dan Signifikan X2:Positif dan Signifikan X3: Positif dan Signifikan

No	Penulis	Judul	Variable dan metode analisis	Hasil penelitian
			X3: Jumlah Penduduk	
4	(Sania et al., 2018) Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah	Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah	<p>Dependen: Y: Pajak Daerah</p> <p>Independen: X1 : PDRB X2: Inflasi X3: Jumlah Penduduk</p>	<p>X1:Positif dan Signifikan</p> <p>X2:Positif dan Signifikan</p> <p>X3: Positif dan Signifikan</p>
5	(Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda et al., n.d.)	Determinan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Kota Samarinda	<p>Dependen: Y: Pajak Daerah</p> <p>Independen: X1 : PDRB X2: Inflasi X3: Jumlah Penduduk</p>	<p>X1:Positif dan Signifikan</p> <p>X2:Tidak signifikan</p> <p>X3: Positif dan Signifikan</p>
6	Miftohal Arifin (2018)	Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Industri dan Pdrb Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Sumenep	<p>Dependen: Y: Pajak Daerah</p> <p>Independen: X1 : PDRB X2:Jumlah Industri</p>	<p>X1:Terdapat Pengaruh</p> <p>X2:Positif dan Signifikan</p> <p>X3:Tidak signifikan</p>

No	Penulis	Judul	Variable dan metode analisis	Hasil penelitian
			X3: Jumlah Penduduk	
7	(Fathiyah & Febrianti, 2021)	Pengaruh Industri Besar, Nilai Investasi Besar, Pdrb Sektor Industri dan Perdagangan Terhadap Penerimaan Pajak Reklame di Kota Jambi Tahun 2011-2020	<p>Dependen:</p> <p>Y: Penerimaan Pajak Reklame</p> <p>Independen:</p> <p>X1 : Industri Besar</p> <p>X2: Pdrb Sektor Industri dan Perdagangan</p>	<p>X1:Positif dan Signifikan</p> <p>X2:Positif dan Signifikan</p>
8	(Dwi et al., 2013)	Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Yogyakarta	<p>Dependen:</p> <p>Y: Penerimaan Pajak Hotel</p> <p>Independen:</p> <p>X1:Jumlah Wisatawan</p> <p>X2:Jumlah Hotel</p> <p>X3:Tingkat Hunian</p>	<p>X1:Positif dan Signifikan</p> <p>X2:Positif dan Signifikan</p> <p>X3: Positif dan Signifikan</p>
9	(Sanjaya & Wijaya, 2020)	Pengaruh Jumlah Hotel dan Restoran terhadap Penerimaan Pajaknya serta Dampaknya pada Pendapatan Asli	<p>Dependen:</p> <p>Y1: Penerimaan Pajak</p> <p>Y2: Pendapatan Asli Daerah</p>	X1:Positif dan Signifikan

No	Penulis	Judul	Variable dan metode analisis	Hasil penelitian
		Daerah di Sumatera Barat	Independen: X1:Jumlah Hotel dan Restoran	
10	(Percetakan et al., n.d.)	Pengaruh Jumlah Perusahaan, Jumlah Penduduk dan Pdrb Terhadap Penerimaan Pajak Reklame di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2004-2015	Dependen: Y:Pajak Daerah Independen: X1:Jumlah Perusahaan X2: PDRB X3: Jumlah Penduduk	X1:Positif dan Signifikan X2:Positif dan Signifikan X3:Tidak Signifikan
11	(Haniz & Sasana, 2013)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal	Dependen: Y:Pajak Daerah Independen: X1 : PDRB X2: Inflasi X3:Pertumbuhan Ekonomi	X1:Positif dan Signifikan X2:Tidak Signifikan X3: Positif dan Signifikan
12	(Suhendro et al., 2021)	Pengaruh Governance Terhadap Penerimaan Pajak Daerah	Dependen: Y: Pajak Daerah Independen: X1 : Inflasi X2: PDRB	X1:Terdapat Pengaruh X2:Terdapat Pengaruh X3:Terdapat Pengaruh

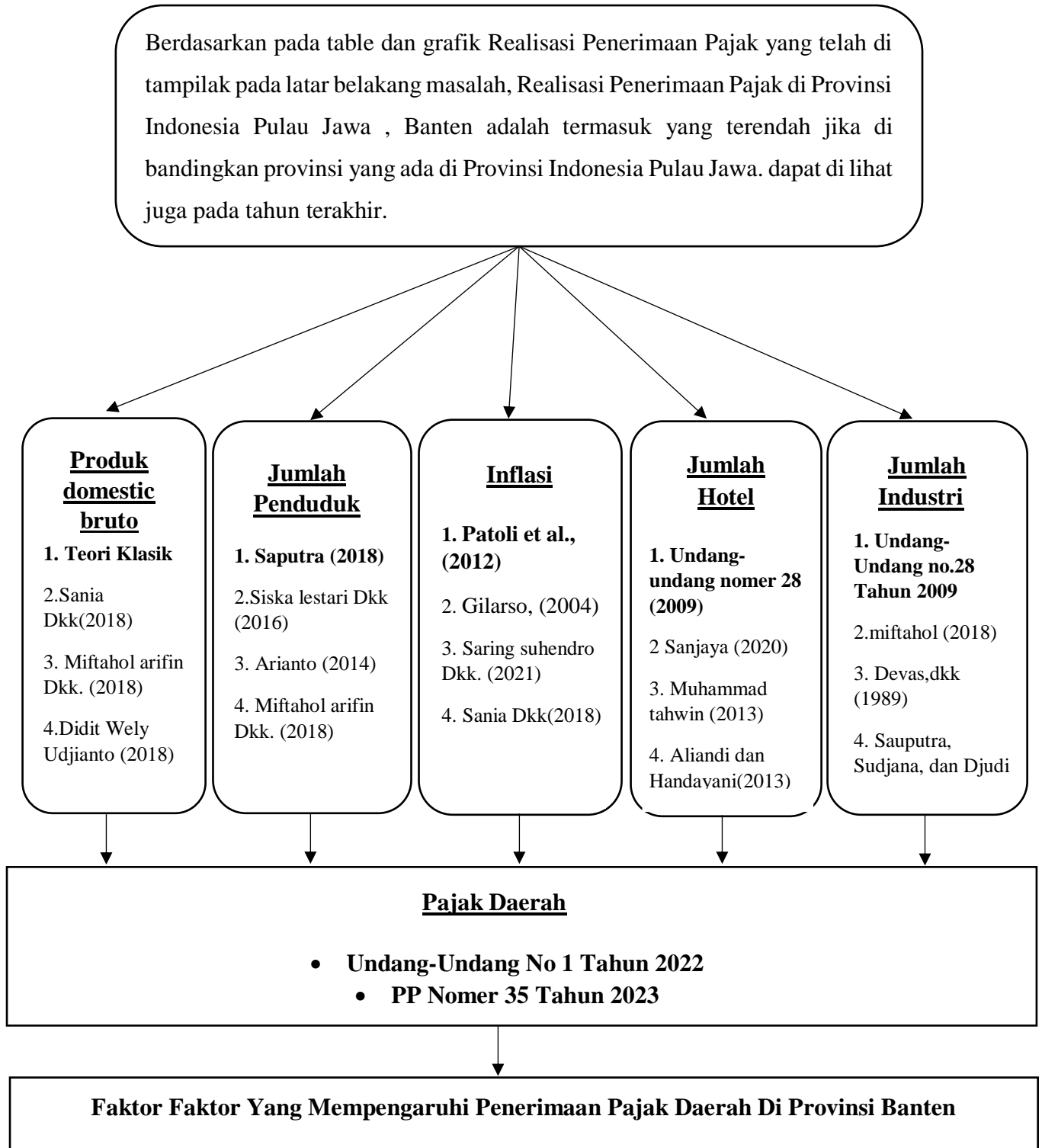
No	Penulis	Judul	Variable dan metode analisis	Hasil penelitian
			X3: Jumlah Penduduk	
13	(Lumy et al., 2018)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintahan Provinsi di Sumatera Utara	Dependen: Y: Pajak Daerah Independen: X1 : Inflasi X2: PDRB X3: Jumlah Penduduk	X1:Terdapat Pengaruh X2:Terdapat Pengaruh X3:Terdapat Pengaruh
14	(Felix & Watkins, n.d.)	The Impact Of an Aging U.S. Population on State Tax Revenues	Dependen: Y: Pajak Daerah Independen: X1:Jumlah Penduduk X2: PDRB	X1:Positif dan Signifikan X2:Positif dan Signifikan
15	(Immervoll, n.d.)	The Impact of Inflation on income tax and social insurance contributions in Europa	Dependen: Y:Pajak Daerah Independen: X1 : Inflasi X2: PDRB X3:Jumlah Penduduk	X1:Tidak Signifikan X2:Positif dan Signifikan X3: Positif dan Signifikan

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran memberikan pemahaman yang lebih mudah dalam sebuah penelitian untuk mencapai tujuan dan merumuskan kesimpulan yang sesuai. Dalam penelitian ini dengan judul “Analisis Faktor Faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kab/kota Provinsi Banten Tahun 2017-2021” menetapkan Jumlah Hotel sebagai (X1), PDRB sebagai (X2), Inflasi (X3), Jumlah Penduduk (X4) dan Jumlah Industri (X5) yang akan mempengaruhi Penerimaan Pajak daerah Kab/kota di Provinsi Banten sebagai variable (Y). Penelitian ini mencari pengaruh dan hubungan antar variable bebas dengan variable terikat dimana variable terikatnya adalah Penerimaan Pajak daerah di Kab/kota Provinsi Banten yang hendak diteliti oleh adanya pengaruh variable-variable bebas yang terdiri dari Jumlah hotel, PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri. Dengan demikian dapat di rumuskan kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah yang di pengaruhi oleh empat variabel yaitu produk domestik regional bruto (pdrb), pajak daerah, retribusi daerah, penanaman modal dalam negeri (pmdn) dan jumlah penduduk. Kemudian variabel-variabel tersebut sebagai variabel independen (bebas) atau variabel X dan bersama-sama, dengan variabel dependen (terikat) atau variabel Y yaitu pendapatan asli daerah.

Gambar 2.3.1 Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

Dalam melakukan analisis terlebih dahulu ditentukan hipotesis yang digunakan. Hipotesis adalah jawaban sementara atau kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran dan beberapa hasil empiris yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya maka hipotesis penelitian ini adalah:

- A. Terdapat pengaruh dari Jumlah Hotel, Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri secara parsial terhadap Penerimaan pajak Daerah di provinsi Banten tahun 2017-2021.
- B. Terdapat pengaruh dari Jumlah Hotel, Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di provinsi Banten tahun 2017-2021.

2.5 Hubungan Antar Variabel

A. Hubungan jumlah hotel dengan pajak daerah

Hotel memegang peran penting dalam industri pariwisata, hal dikarenakan tidak sedikit orang enggan mengunjungi daerah wisata karena ketiadaan sarana hotel yang memadai. Hotel menurut Bataafi (2005) merupakan jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian ataupun seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

Berkaitan dengan jumlah hotel maka dapat diartikan banyaknya jumlah akomodasi yang digunakan untuk menginap yang dikelola secara komersil. Berkaitan dengan penerimaan pajak maka sedikit banyaknya jumlah hotel dapat menentukan besar kecilnya penerimaan pajak daerah. Hal ini disebabkan karena jumlah penerimaan pajak hotel ditentukan dari besar tarif pajak yaitu 10% dari total pendapatan hotel. Jadi semakin banyak jumlah hotel maka dapat semakin banyak menarik minat masyarakat untuk menginap dan akan semakin banyak pula pajak yang disetorkan kepada pemerintah.

B. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto dengan Pajak Daerah

Pendapatan per kapita menurut Sukirno (2004: 423) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara/daerah pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Semakin tinggi pendapatan per kapita sebuah negara atau daerah menurut Ausri (2007:41) tertentu semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya dan sebaliknya.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pajak daerah di antaranya adalah jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Inflasi. Semua faktor tersebut selalu berfluktuasi tiap tahunnya dan dapat digunakan sebagai peramalan untuk mengetahui penerimaan pajak daerah (Arianto : 2014).

C. Hubungan antara Inflasi Dengan Pajak Daerah

Inflasi adalah kenaikan suatu harga secara umum yang terjadi terus menerus (Curatman, 2010). Inflasi menjadi masalah karena hal ini menyayatkan daya beli masyarakat suatu negara. Jika harga umum mengalami kenaikan (inflasi) tetapi tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan per kapita, maka jelas daya beli masyarakat menjadi sangat kurang.

Inflasi dapat dirumuskan sebagai kenaikan harga umum, yang bersumber pada terganggunya keseimbangan antara arus uang dan arus barang (Gilarso, 2004). Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus (Nopirin, 2016). Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pajak daerah di antaranya adalah jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Inflasi. Semua

faktor tersebut selalu berfluktuasi tiap tahunnya dan dapat digunakan sebagai peramalan untuk mengetahui penerimaan pajak daerah (Arianto : 2014).

Dampak Inflasi Dampak buruk dari inflasi ditinjau dari tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai berikut (Murni, 2016).

D. Hubungan antara Jumlah Penduduk dengan Pajak Daerah

Penduduk memiliki peran serta dalam mengoptimalkan segala bentuk kegiatan ekonomi di masyarakat, karena itu penduduk merupakan pelaku dari setiap kegiatan yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu penduduk sangat berperan dalam pembangunan terutama dalam hal ini yang berkenaan dengan pajak daerah, jumlah penduduk sangatlah berperan aktif dalam menopang penerimaan pajak karena penduduk adalah merupakan wajib pajak. Sehingga asumsi nya ketika jumlah penduduk meningkat juga akan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Di bawah ini adalah data jumlah penduduk berikut pertambahan setiap tahunnya.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, serta meningkatnya pembangunan restoran, maka akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah. Suatu daerah diharapkan mampu dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah. (Devas, 1989) Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan dalam hal ini, maka pemerintah daerah Kota Manado dapat memenuhi kebutuhan daerahnya dengan Cara meningkatkan pajak daerah, khususnya dari Pajak Restoran. Berikut dapat kita lihat perkembangan realisasi penerimaan pajak restoran, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita masyarakat Kota Manado Tahun 2005-2014.

Jumlah penduduk adalah banyaknya penduduk yang tinggal/menetap di suatu daerah/wilayah tertentu, yang diukur dalam satuan jiwa pertahun. Jumlah penduduk menurut teori Hansen mengenai stagnasi (secular stagnation) dalam (Devas, 1989) yang menyatakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk justru akan menciptakan atau memperbesar permintaan agregatif.

Perkembangan jumlah penduduk juga dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, karena seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk pada suatu daerah maka dapat berpotensi meningkatkan jumlah wajib pajak sehingga nantinya penerimaan pajak juga akan meningkat. Sehingga dengan bertambahnya jumlah penduduk akan berdampak langsung pada penerimaan pajak daerah (Saputra, Sudjana dan Djudi 2014)

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pajak daerah di antaranya adalah jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Inflasi. Semua faktor tersebut selalu berfluktuasi tiap tahunnya dan dapat digunakan sebagai peramalan untuk mengetahui penerimaan pajak daerah (Arianto, 2014).

E. Hubungan antara Jumlah Industri dengan Pajak Daerah

Jumlah industri adalah jumlah seluruh industri kecil dan industri besar yang mana industri merupakan salah satu faktor positif pemicu pertumbuhan ekonomi ketika jumlah industri mulai meningkat tentu perusahaan tersebut perlu memasarkan produk tersebut di tengah masyarakat dengan menggunakan media reklame untuk memperkenalkannya. Menurut (Sutrisno, 2002) jumlah industri berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Penilaian tersebut sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh (Devas Dkk, 1989), bahwa sebagian besar pemerintah daerah tingkat II (sekarang Kabupaten/Kota) menarik pajak atas benda papan reklame di daerah. Karena pajak reklame ini cocok untuk sumber penerimaan daerah, karena tempat objek pajak dapat mudah diketahui. Jumlah industri yang menggunakan jasa pemasangan reklame juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Hal ini disebabkan apabila suatu industri yang ingin memasarkan produknya dapat menggunakan atau memasang reklame agar dapat diketahui oleh masyarakat. Hal tersebut dapat menambah jumlah penerimaan pajak itu sendiri. Bertambahnya jumlah industri yang memasang reklame mengakibatkan obyek pajak bertambah luas, sehingga penerimaan daerah pun meningkat (Syuhada Sofian, 1997).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Pada penelitian ini terdapat variabel independen yang meliputi Jumlah Hotel, Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Jumlah Penduduk, Jumlah Industri. Sementara variabel dependen yang digunakan adalah Penerimaan Pajak Daerah, serta lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, pada rentang waktu tahun 2017-2021.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Adapun data-data yang dibutuhkan terdiri atas data Pajak Daerah, Jumlah Hotel, PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk serta data Jumlah Industri. Kemudian jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah berupa data panel serta data sekunder yang dipakai berupa deret waktu (*timeseries data*) tahun 2017-2021 dan data *crosssection* yang ada di Kab/Kota Provinsi Banten, Kab Pandeglang, Kan Lebak, Kan Tangerang, Kab Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan

3.3 Variabel Penelitian dan Oprasionalisasi Variabel

Variabel penelitian ini adalah terdiri dari variabel dependen dan independen. Variabel dependen adalah variabel terikat, merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas, sedangkan variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab perubahan dari variabel terikat atau variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel bebas terdiri dari : Jumlah Hotel, Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Industri. sedangkan variabel dependennya (terikat) adalah Penerimaan Pajak Daerah.

Definisi operasionalisasi variabel adalah definisi variabel yang memperjelas dan memudahkan dalam memahami penggunaan variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Definisi dari variabel-variabel yang digunakan

dalam penelitian ini antara lain :

A. Penerimaan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh badan atau perseorangan yang sifatnya memaksa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan tidak diduplikasinya imbalan secara langsung dan akan digunakan untuk kebutuhan daerah dan kemakmuran rakyat, dalam usulan penelitian ini **Pajak Daerah = Tax**

B. Jumlah Hotel

Jumlah Hotel adalah merupakan jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian ataupun seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan dan penginapan. Makan dan minum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan pemerintah. **Jumlah Hotel = TH**

C. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto ialah pendapatan bersih dari hasil produksi barang ataupun jasa akhir yang didapat dari sektor-sektor kegiatan perekonomian di dalam wilayah pada periode tertentu. Dalam usulan penelitian ini **Produk Domestik Regional Bruto = GRDP**

D. Inflasi

Inflasi ialah kenaikan suatu harga secara umum yang terjadi terus menerus. Dalam usulan penelitian ini **Inflasi = INF**

E. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk adalah banyaknya penduduk yang tinggal/menetap di suatu daerah/wilayah tertentu, yang diukur dalam satuan jiwa pertahun. **Jumlah Penduduk = TP**

F. Jumlah Industri

Jumlah Industri adalah jumlah keseluruhan industri kecil dan industri besar yang mana industri merupakan salah satu faktor positif pemicu pertumbuhan ekonomi, ketika jumlah industri mulai meningkat tentu perusahaan tersebut perlu memasarkan produk tersebut di tengah masyarakat

dengan menggunakan media reklame untuk memperkenalkannya. **Jumlah Industri = TI**

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel Penelitian	Konsep Variabel	Satuan	Sumber data
1	Pajak Daerah Simbol: TAX	Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh badan atau perseorangan yang sifatnya memaksa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan tidak didapatkannya imbalan secara langsung dan akan digunakan untuk kebutuhan daerah dan kemakmuran rakyat, dalam usulan penelitian ini	Juta Rupiah (Rp)	DPJK
2	Jumlah Hotel Simbol: TH	Jumlah Hotel adalah merupakan jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian ataupun seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan dan penginapan. Makan dan minum yang dikelola secara komersial serta memenuhi	Ribu Orang	BPS

ketentuan persyaratan yang di tetapkan pemerintah

3	Produk Domestik Regional Bruto Simbol: GRDP	Produk Domestik Regional Bruto ialah pendapatan bersih dari hasil produksi barang ataupun jasa akhir yang didapat dari sektor-sektor kegiatan perekonomian di dalam wilayah pada periode tertentu. Dalam usulan penelitian ini	Juta Rupiah (Rp)	BPS
4	Inflasi Simbol: INF	Inflasi ialah kenaikan suatu harga secara umum yang terjadi terus menerus. Dalam usulan penelitian ini	Persen (%)	BPS
5	Jumlah Penduduk Simbol: TP	Jumlah penduduk adalah banyaknya penduduk yang tinggal/menetap di suatu daerah/wilayah tertentu, yang diukur dalam satuan jiwa pertahun	Ribuan Jiwa	BPS
6	Jumlah Industri Simbol: TI	Jumlah Industri adalah jumlah keseluruhan industri kecil dan industri besar yang mana industri merupakan salah satu faktor positif pemicu pertumbuhan ekonomi, ketika jumlah industri mulai meningkat	Satuan	BPS

tentu perusahaan tersebut
perlu memasarkan produk
tersebut di tengah
masyarakat dengan
menggunakan media
reklame untuk
memperkenalkannya

3.3 Metode Analisis Data

Seluruh data yang sudah dikumpulkan untuk dipakai pada penelitian kemudian diproses untuk dianalisis dapat menggunakan software sebagai salah satu cara untuk mempermudah dalam penelaahannya. Metode analisis data merupakan bagian krusial dalam penelitian. Terdapat beberapa prosedur pengkajian data yang dipakai pada penelitian ini diantaranya analisis untuk pemilihan model regresi, kemudian analisis untuk uji asumsi klasik, dan juga uji hipotesis yang bisa dilakukan melalui metode regresi linier berganda, uji koefisien determinasi (R^2), uji signifikansi simultan (uji statistik f), serta uji signifikansi parameter individual (uji statistik t). Karena dalam penelitian ini diperlukan untuk

Memenuhi atau bebas dari asumsi klasik, semua data yang mewakili variabel yang digunakan akan ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma. Penelitian ini menggunakan *software* untuk mempermudah penganalisaan yang bernama Eviews 9 yang hasil outputnya akan digunakan untuk menjawab hipotesis yang sudah diajukan.

Ada beberapa jenis data yang dapat dipakai untuk diteliti. Data *time series* yang mana data yang digunakan dalam penelitian dengan hanya satu objek namun memiliki beberapa jangka waktu. Data *cross section* merupakan data yang dipakai untuk diobservasi dengan beberapa objek penelitian namun satu jangka waktu. Pemilihan data pada penelitian ini merupakan gabungan dari kedua jenis data tersebut yang disebut data panel. Pada metode regresi data panel, data yang dipakai dalam observasi dilaksanakan dalam beberapa subjek yang dikaji dengan kurun waktu tertentu. Menurut Gujarati terdapat beberapa kelebihan dalam penggunaan data panel :

- A. Data panel yakni data hasil kombinasi dari data *cross section* dengan *time series* mampu menghasilkan lebih banyak variasi, lebih banyak menghasilkan informasi, lebih efisien, lebih banyak *degree of freedom*, dan sedikit kolinearitas antar variabel.
- B. Sebuah data yang dipilih untuk penelitian bersumber dari individu ataupun badan pasti memiliki heterogenitas. Data panel dapat mengatasi heterogenitas

karena kombinasi dari varian tempat dan waktu.

- C. Data panel mampu mendeteksi dan mengidentifikasi dampak jangka pendek yang tidak bisa jika dilakukan dengan data belah silang asli atau data runtutan waktu.
- D. Pada data panel terdapat data *cross section* yang dapat menggambarkan kondisi variabel pada saat tertentu. Karena pada data panel data *cross section* berulang-ulang maka dapat mengamati kondisi variabel sepanjang waktu pengamatan yang akan menguntungkan bagi penyesuaian ekonomi.

Dalam analisis model panel data dikenal tiga macam pendekatan yang terdiri dari pendekatan kuadrat terkecil (Pooled Least Square), pendekatan efek tetap (fixed effect) dan pendekatan efek acak (random effect).

Menurut (Gujarati, 2015), data panel (*pooled*) adalah kombinasi data runtun waktu (*time series*) dan individual (*cross section*). Menurut Widarjono (2007: 249), ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data panel. Pertama, data panel yang merupakan gabungan dari *datatime series* dan *cross section* mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Kedua, menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variable.

Persamaan regresi data Panel yaitu:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \varepsilon_{it} \quad (3.1)$$

Keterangan:

Y : Variabel dependen

X : Variabel independen

β_0 : Intersep; Harga Y ketika X = 0 (harga konstan)

β_i, β_n : Koefisien Regresi masing-masing variable independen

i : Banyaknya observasi (*cross section*)

t : Waktu

Adapun model persamaan dalam penelitian ini :

$$TAX_{it} = \beta_0 + \beta_1 TH_{it} + \beta_2 GRDP_{it} + \beta_3 INF_{it} + \beta_4 TP_{it} + \beta_5 TI_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3.2)$$

Keterangan:

TAX = Pajak Daerah (Juta Rupiah)

TH = Jumlah Hotel (Ribuan Orang)

GDRP = Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah)

INF = Inflasi (Persen)

TP = Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)

TI = Jumlah Industri (Satuan)

ε = Error

I = Banyaknya Observasi (*cross section*)

t = Waktu

1. Pendekatan Model

a. Koefisien Tetap Antar Waktu dan Individu (*Common Effect Model*)

Teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Dengan hanya

menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu maka kita bisa menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) untuk mengestimasi model data panel. Metode ini dikenal dengan estimasi *Common Effect Model* (CEM). Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antara individu sama dalam berbagai kurun waktu.

b. *Slope* konstan Tetapi Intersep Berbeda Antar Individu (*Fixed Effect Model*)

Teknik model *fixed effect* adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variable *dummy* untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Pengertian FEM ini didasarkan adanya perbedaan intersep individu namun intersepnya sama antar waktu. Disamping itu, pendekatan ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antar individu dan antar waktu.

c. Estimasi dengan Pendekatan *Random Effect Model* (REM)

d. Dimasukkannya variable *dummy* di dalam model FEM bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya. Namun, ini juga membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini bisa diatasi dengan menggunakan variable gangguan dikenal sebagai metode *random effect*. Di dalam metode ini kita akan mengestimasi data panel dimana variable gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu.

2. Pemilihan Model

Untuk menentukan model terbaik yang dapat digunakan, peneliti harus melakukan uji pemilihan teknik estimasi regresi. Terdapat dua cara dalam melakukan penelitian teknik estimasi untuk menentukan teknik yang paling tepat dalam mengestimasi parameter data panel, sebagai berikut:

a. Uji Chow

Uji Chow merupakan uji untuk membandingkan model *common effect* dengan *fixed effect* (Widarjono, 2013). Uji Chow dalam penelitian ini menggunakan program *eviews* 8.0. Hipotesis yang dibentuk dalam uji chow adalah sebagai berikut:

Uji hipotesis statistic:

$H_0 : \rho_{value} > \alpha$ Model CEM

$H_1 : \rho_{value} < \alpha$ Model FEM

b. Uji Hausman

Pengujian ini membandingkan moden FEM dengan REM dalam menentukan model yang terbaik untuk digunakan sebagai moel regresi data panel (Gujarati, 2012). Uji Hausman menggunakan program yang serupa dengan uji chow yaitu program *evIEWS* 8.0. Hipotesis yang dibentuk dalam uji hausman adalah sebagai berikut:

Uji Hipotesis statistic:

$H_0 : \rho_{value} > \alpha$ Model REM

$H_1 : \rho_{value} < \alpha$ Model FEM

3.4 Uji Normalitas

Pengujian tentang kenormalan distribusi data. Penggunaan uji normalitas karena pada analisis statistic parametik, asumsi yang dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut harus terdistribusi normal. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variable dependen dan variable indeviden atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.

Uji normalitas dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik persamaan regresi. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, model regresi memenuhi asumsi normalitas, sebaliknya jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Gujarati dan Porter, 2015)

Untuk menguji suatu data berdistribusi normal atau tidak, dapat digunakan alat statistic *Jarque-Bera* (JB) yang dinyatakan sebagai berikut (Gujarati dan Porter, 2015)

$$\mathbf{JB} = \mathbf{n} \left[\frac{s^2}{6} + \frac{(k-3)^2}{24} \right]$$

Dimana:

n : Jumlah observasi

S : Koefisien *skewness*

K : Koefisien *kurtosis*

Uji Hipotesis Statistik:

H_0 : $JB_{test} > Chi\ Square_{table}$, data tidak terdistribusi normal

H_1 : $JB_{test} < Chi\ Square_{table}$, data terdistribusi normal

3.5 Uji Asumsi Klasik

Pada uji asumsi klasik dikenal dengan yang namanya BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) maka dari itu harus memenuhi kriteria tersebut. Kemudian ada beberapa permasalahan yang bisa menyebabkan sebuah estimasi tidak dapat memenuhi asumsi kriteria BLUE, yaitu:

3.6 Uji Multikolinearitas

Uji yang bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variable-variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variable-variabel bebasnya, maka hubungan antara variable bebas terhadap variable terikatnya menjadi terganggu. Salah satu asumsi klasik yang harus dipenuhi dalam analisis data yang tidak adanya hubungan linier yang sempurna atau tepat diantara variabel-variabel bebas dalam model regresi (Gujarati dan Porter, 2015)

Uji Hipotesis statistic:

H_0 : *correlation matrix* > 0.8, Terjadi multikolinearitas

H_1 : *correlation matrix* < 0.8, Tidak terjadi multikolinearitas

3.7 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik yaitu tidak heterokedastisitas. Untuk menentukan apakah model yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari masalah heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Cara untuk mendeteksi heterokedastisitas dalam model

salah satunya dengan menggunakan *uji white*. Persamaan regresi perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varian residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varian yang sama disebut homokedastisitas dan jika variannya tida sama/ beda disebut heterokedastisitas (Gujarati dan Porter, 2015)

Uji Hipotesis Statistik:

H_0 : $\text{Chi Square}_{hitung} > \text{Chi Square}_{table}$, Terjadi heterokedastisitas

H_1 : $\text{Chi Square}_{hitung} < \text{Chi Square}_{table}$, Tidak terjadi heterokedastisitas

Adapun cara menghitung *chi square* hitung yaitu:

$$\text{Chi Square}_{hitung} = R^2 \times n$$

Dimana :

R^2 : R-squared

n : Jumlah data

3.8 Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara satu variable gangguan dengan variable gangguan lain (Gujarati dan Porter, 2015). Dalam pemelitan ini, uji autokorelasi dideteksi dengan menggunakan metode *Durbin Watson* (DW) dengan ketentuan yang tertera pada table berikut:

Tabel 3.2

Uji Statistik *Durbin-Watson d*

Nilai Statistik d	Hasil
$0 < d < D_L$	Menolak hipotesis nol; ada autokorelasi positif
$D_L \leq d \leq D_U$	Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan
$d_U \leq d \leq 4 - d_U$	Menerima hipotesis nol; tidak ada autokorelasi positif/negative
$4 - d_U \leq d \leq 4 - D_L$	Daerha keragu-raguan; tidak ada keputusan

$4 - dL \leq d \leq 4$ Menolak hipotesis nol; ada autokorelasi negatif

Sumber: Widarjono (2007)

Uji hipotesis statistic:

$H_0 : DU > DW > 4 - DU$, Terjadi autokorelasi

$H_1 : DU < DW < 4 - DU$, Tidak terjadi autokorelasi

Berdasarkan Tabel 2.3, kriteria pengujian autokorelasi dengan menggunakan metode *Durbin Watso* yang harus dipenuhi (terima H_0 tolak H_1) yaitu $dU \leq d \leq 4 - dU$.

3.9 Hipotesis Statistik

Hipotesis merupakan suatu anggapan atau suatu dugaan mengenai populasi. Sebelum menolak atau menerima sebuah hipotesis statistic, seorang peneliti harus menguji keabsahan hipotesis tersebut untuk menentukan apakah hipotesis itu benar atau salah dengan nilai *probablitas*.

Pengujian hipotesis statistic dapat dinyatakan secara sederhana sebagai berikut. Apakah sebuah pengamatan atau penemuan sesuai dengan beberapa hipotesis statistic yang dinyatakan atau tidak. Dalam bahasa statistika, hipotesis statistic yang dinyatakan dikenal sebagai hipotesis statistic nol dan dilambangkan H_0 . Hipotesis nol biasanya dilawankan pengujiannya terhadap hipotesis statistic alternative-hipotesis yang dipertahankan yang dilambangkan dengan H_1 . (Gujarati dan Porter, 2015)

Dalam bahasa uji signifikansi, sebuah statistic dikatakan signifikan secara statistic jika nilai dari uji statistiknya berada di daerah krotos. Pada kasus ini, hipotesis nol ditolak. Sebaliknya, pengujian tidak signifikan secara statistic, jika nilai dari uji statistiknya berada di daerah ppenerimaan (Gujarati, 2015)

1. Uji Statistik t (Uji Parsial)

Dalam uji t pada penelitian ini digunakan hipotesis statistic sebagai berikut:

a. Pengaruh Jumlah Hotel terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

$H_0 : \beta_1 = 0$, Tidak terdapat pengaruh, Jumlah Hotel terhadap Pajak Daerah dengan asumsi variable lain dianggap konstan (*ceteris paribus*)

$H_1 : \beta_1 \neq 0$, Terdapat pengaruh Jumlah Hotel terhadap Pajak Daerah, dengan asumsi variable lain dianggap konstan (*ceteris paribus*)

b. Pengaruh PDRB terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

$H_0 : \beta_2 = 0$, Tidak terdapat pengaruh PDRB terhadap Pajak Daerah, dengan asumsi variable lain dianggap konstan (*ceteris paribus*)

$H_1 : \beta_2 \neq 0$, Terdapat pengaruh PDRB terhadap Pajak Daerah, dengan asumsi variable lain dianggap konstan (*ceteris paribus*)

c. Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

$H_0 : \beta_3 = 0$, Tidak terdapat Inflasi terhadap Pajak Daerah, dengan asumsi variable lain dianggap konstan (*ceteris paribus*)

$H_1 : \beta_3 \neq 0$, Terdapat pengaruh Inflasi terhadap Pajak Daerah, dengan asumsi variable lain dianggap konstan (*ceteris paribus*)

d. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

$H_0 : \beta_4 = 0$, Tidak terdapat Jumlah Penduduk terhadap Pajak Daerah, dengan asumsi variable lain dianggap konstan (*ceteris paribus*)

$H_1 : \beta_4 \neq 0$, Terdapat pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pajak Daerah, dengan asumsi variable lain dianggap konstan (*ceteris paribus*)

e. Pengaruh Jumlah Industri terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

$H_0 : \beta_5 = 0$, Tidak terdapat Jumlah Industri terhadap Pajak Daerah, dengan asumsi variable lain dianggap konstan (*ceteris paribus*)

$H_1 : \beta_5 \neq 0$, Terdapat pengaruh Jumlah Industri terhadap Pajak Daerah, dengan asumsi variable lain dianggap konstan (*ceteris paribus*)

Nilai $t_{\text{statistik}}$ diperoleh dengan rumus:

$$t_{hitung} = \frac{\beta_i}{se(\beta_i)}$$

Dimana:

β_i : Koefisien regresi variable independen ke-i

$se(\beta_i)$: *Standar error* dari variable independen ke-i

Pada taraf kesalahan 0,05 dan derajat bebas (df = n-k; dimana n yaitu jumlah data dan k yaitu jumlah variable), pengambilan keputusan uji hothesis secara parsial didasarkan pada nilai t statistic yang diperoleh dengan kriteria sebagai berikut (Gujarati dan Porter, 2015)

- a. Jika nilai $t_{statistik} > t_{tabel}$ atau $-t_{statistik} < -t_{tabel}$ pada taraf kesalahan 0.05, maka hipotetsis statistik atau H_0 ditolak, konsekuensinya yaitu H_1 diterima, berarti bahwa secara individual (parsial) variable Belanja Modal, Belanja Hibah, dan Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dengan asumsi variable lain dianggap konstan (*ceteris paribus*).
- b. Jika nilai $t_{statistik} < t_{tabel}$ atau $-t_{statistik} > -t_{tabel}$ pada taraf kesalahan 0.05, maka hipotetsis statistik atau H_1 ditolak, konsekuensinya yaitu H_0 diterima, berarti bahwa secara individual (parsial) variable Belanja Modal, Belanja Hibah, dan Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dengan asumsi variable lain dianggap konstan (*ceteris paribus*).

2. Uji Statistik F (Uji Simultan)

Uji F ini adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variable independen secara bersama-sama terhadap variable dependen. Statistic uji F mengikuti distribusi F dengan derajat bebas sebanyak (k-1) untuk numerator dan (n-k) untuk denominator, dimana k merupakan banyaknya parameter termasuk intersep/konstanta, sedangkan n banyaknya observasi (Widarjono, 2007)

Nilai F-Statistik yang besar lebih baik dibandingkan dengan nilai F-statistik yang rendah. Nilai Prob (F-Statistik) merupakan tingkat signifikansi marjinal dari F-statistik.

Hipotesis statistik simultan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5 \neq 0,$ Tidak terdapat pengaruh Jumlah Hotel, PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk, Jumlah Industri terhadap Pajak Daerah, dengan asumsi variable lain dianggap konstan (*ceteris paribus*)

$H_1 : \text{ada salah satu } \beta_1 = 0,$ Terdapat pengaruh Jumlah Hotel, PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk, Jumlah Industri terhadap Pajak Daerah, dengan asumsi variable lain dianggap konstan (*ceteris paribus*)

Pada taraf kesalahan (α) = 0,05 (5%) dan derajat bebas: $df_1 = (k-1)$, $df_2 = (n-k)$, dimana n yaitu jumlah data dan k yaitu jumlah variable), pengambilan keputusan uji hipotesis secara simultan didasarkan pada nilai probabilitas yang diperoleh dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai $F_{\text{statistik}} > F_{\text{tabel}}$ atau $-F_{\text{statistik}} < -F_{\text{tabel}}$ pada taraf kesalahan 0.05, maka hipotesis statistik atau H_0 ditolak, konsekuensinya yaitu H_1 diterima, berarti bahwa secara simultan variable Jumlah Hotel, PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah, dengan asumsi variable lain dianggap konstan (*ceteris paribus*).
- b. Jika nilai $F_{\text{statistik}} < F_{\text{tabel}}$ atau $-F_{\text{statistik}} > -F_{\text{tabel}}$ pada taraf kesalahan 0.05, maka hipotesis statistik atau H_1 ditolak, konsekuensinya yaitu H_0 diterima, berarti bahwa secara simultan Jumlah Hotel, PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah, dengan asumsi variable lain dianggap konstan (*ceteris paribus*).

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek/Daerah Penelitian

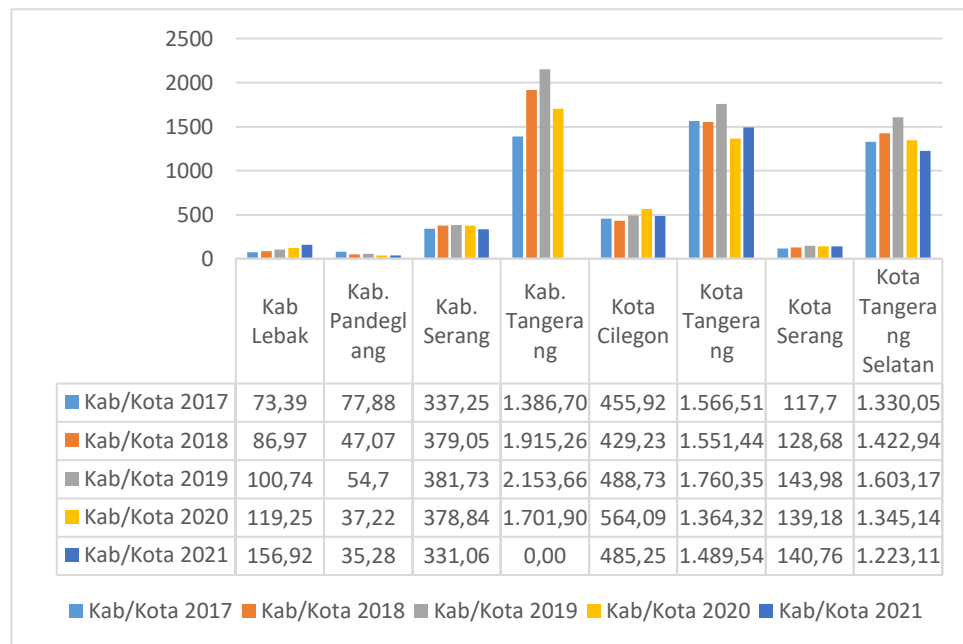
Gambaran umum dimaksud agar dapat melihat bagaimana gambaran variable yang diteliti, Variable yang diteliti yaitu penerimaan pajak daerah sebagai variable dependen dan variabel independen yaitu Jumlah Hotel, Inflasi, Pendapatan domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri di Kab/Kota Provinsi Banten tahun 2017-2021.

A. Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sementara itu menurut (Siahaan, 2010) pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Adapun menurut (Adisasmitha, 2011) pajak daerah merupakan kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum. Sementara itu menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 tahun 2017 pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian di atas maka penyusun menyimpulkan jika pajak daerah merupakan iuran yang diberbankan kepada orang atau badan yang dapat dipaksakan. Jadi pajak merupakan kewajiban yang bersifat memaksa dan merupakan salah satu sumber pendapatan dalam pembangunan daerah yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017-2021, Statistik Indonesia

Gambar 4.1 Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah di Kab/Kota Provinsi Banten tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)

Berdasarkan Gambar 4.1 Penerimaan Pajak Daerah tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 sampai dengan 2021 penerimaan Pajak Daerah di Kab/Kota Provinsi Banten mengalami kondisi umum dimana pada Tahun tersebut mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, namun pada Tahun 2020 dan 2021 yaitu pada kondisi covid-19 Penerimaan Pajak Daerah mengalami penurunan sehingga perlu dianalisis.

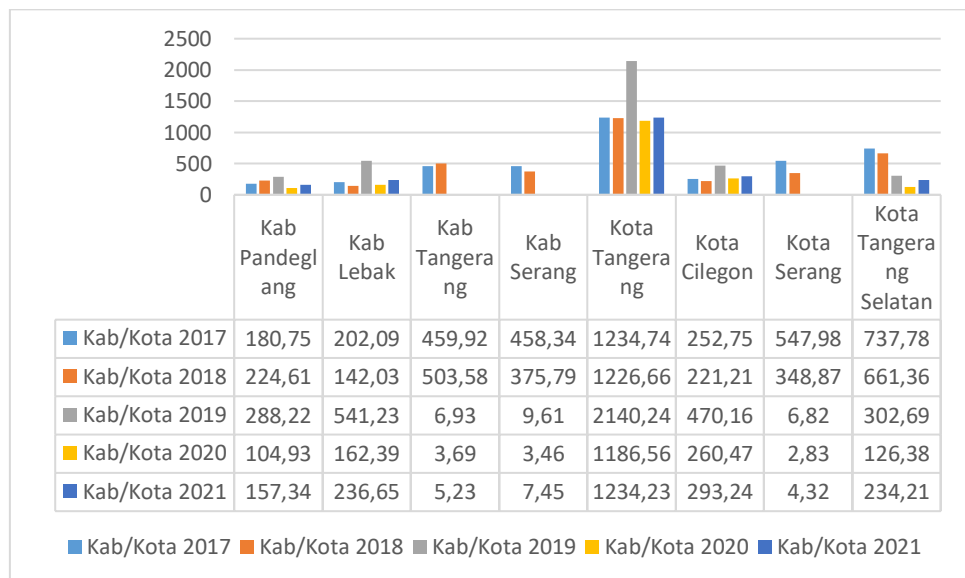
Maka apabila wilayah Kab/Kota Provinsi Banten tidak berupaya meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan penerimaan pajak daerah tentu ini akan sangat berdampak terhadap sumber penerimaan pemerintah pusat maupun

daerah di wilayah tersebut.

B. Perkembangan Jumlah Hotel

Hotel memegang peran penting dalam industri pariwisata, hal dikarenakan tidak sedikit orang enggan mengunjungi daerah wisata karena ketiadaan sarana hotel yang memadai. Hotel menurut (Bataafi, 2005) merupakan jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian ataupun seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

Berkaitan dengan jumlah hotel maka dapat diartikan banyaknya jumlah akomodasi yang digunakan untuk menginap yang dikelola secara komersil. Berkaitan dengan penerimaan pajak maka sedikit banyaknya jumlah hotel dapat menentukan besar kecilnya penerimaan pajak daerah. Hal ini disebabkan karena jumlah penerimaan pajak hotel ditentukan dari besar tarif pajak yaitu 10% dari total pendapatan hotel. Jadi semakin banyak jumlah hotel maka dapat semakin banyak menarik minat masyarakat untuk menginap dan akan semakin banyak pula pajak yang disetorkan kepada pemerintah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017-2021, Statistik Indonesia

Gambar 4. 2 Perkembangan jumlah hotel di kab/kota Provinsi Banten Tahun

2017-2021 (Juta Rupiah)

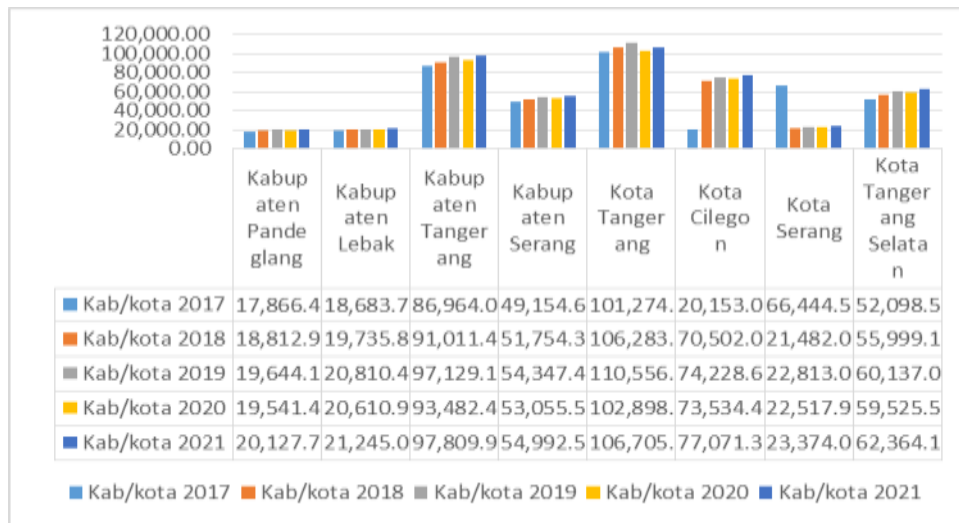
Berdasarkan Gambar 4.2 Jumlah tamu domestic pada usaha akomodasi menurut klasifikasi hotel dan Kab/Kota di provinsi banten dalam periode 2017-2021 mengalami kenaikan setiap tahunnya yang di jelaskan pada Gambar 4.2 Akan membawa dampak positif bagi penerimaan pajak di provinsi Banten. Jumlah tamu domestic pada usaha akomodasi menurut klasifikasi hotel dan Kab/Kota di provinsi banten dalam periode 2017-2021 mengalami kenaikan setiap tahunnya yang di jelaskan pada Tabel 2.1. Berdasarkan data yang ditemukan Kab.Pandeglang,Kab Lebak, Kab Tangerang dan di susul beberapa 4 Kab/kota lainnya yang mengalami kenaikan dari Jumlah Tamu Pada setiap tahunnya, Akan membawa dampak positif bagi penerimaan pajak di provinsi Banten.

C. Perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto

Menurut (Todaro, 2002), produk domestik regional bruto ialah nilai total atas segenap hasil output akhir dari perekonomian di suatu wilayah (baik itu dilakukan oleh penduduk wilayah tersebut maupun penduduk dari wilayah lain yang menempati wilayah tersebut). Besaran nilainya dilihat pada besarnya faktor produksi dan sumber daya alam daerah tersebut.

Untuk bisa mengetahui kondisi ekonomi suatu provinsi atau wilayah dalam periode tertentu salah satunya dapat ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto, baik atas dasar harga berlaku ataupun atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang diciptakan oleh seluruh unit usaha. dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi pada suatu wilayah.

Perkembangan PDRB Kab/kota di provinsi Banten dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017-2021, Statistik Indonesia

Gambar 4.3 Perkembangan PDRB di Kab/Kota Provinsi Banten Tahun 2017 – 2021 (Juta Rupiah)

Pada Gambar 4.3 diatas dapat dilihat bahwa secara garis besar perkembangan PDRB di kab/kota provinsi Banten mengalami fluktuatif ditiap tahunnya. dapat dilihat bahwa secara garis besar perkembangan produk domestik regional bruto di 8 Kab/kota Provinsi Banten pada Tahun 2017-2021 mengalami peningkatan pada setiab kab/kota, jumlah total pdrb banten di 2 tahun terakhir mengalami pada 2021 sebesar 463,690.06 juta rupiah naik 18,523,39 dari tahun sebelumnya 2020

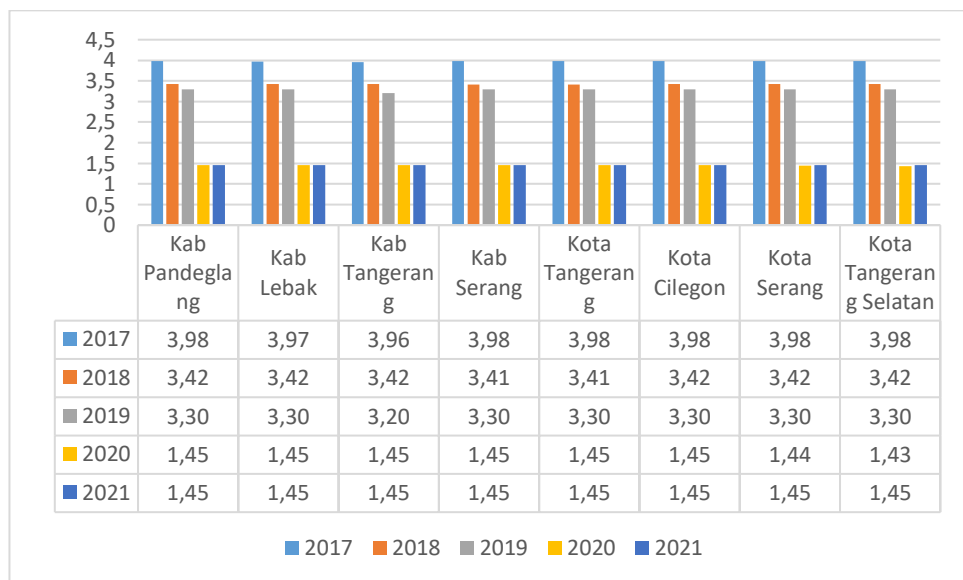
D. Perkembangan Inflasi

Inflasi adalah kenaikan suatu harga secara umum yang terjadi terus menerus (Curatman, 2010). Inflasi menjadi masalah karena hal ini menyayatkan daya beli masyarakat suatu negara. Jika harga umum mengalami kenaikan (inflasi) tetapi tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan per kapita, maka jelas daya beli masyarakat menjadi sangat kurang.

Inflasi dapat dirumuskan sebagai kenaikan harga umum, yang bersumber pada terganggunya keseimbangan antara arus uang dan arus barang (Gilarso, 2004). Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus

menerus (Nopirin, 2016). Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan.

Perkembangan Inflasi di provinsi Banten menurut bulan dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017-2021, *Statistik Indonesia*.

Gambar 4.4 Perkembangan Inflasi di Kab/Kota Provinsi Banten Tahun 2017 - 2021 (Persen)

Pada Gambar 4.4 diatas dapat dilihat bahwa secara garis besar perkembangan Inflasi di kab/kota provinsi Banten mengalami kestabilan dan hanya menurun di dua kab/kota yaitu kab Tangerang dan kota Tangerang selatan. Menunjukkan bahwa di kawasan dapat dilihat secara data keseluruhan dari Tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa inflasi pada level ini juga menggambarkan

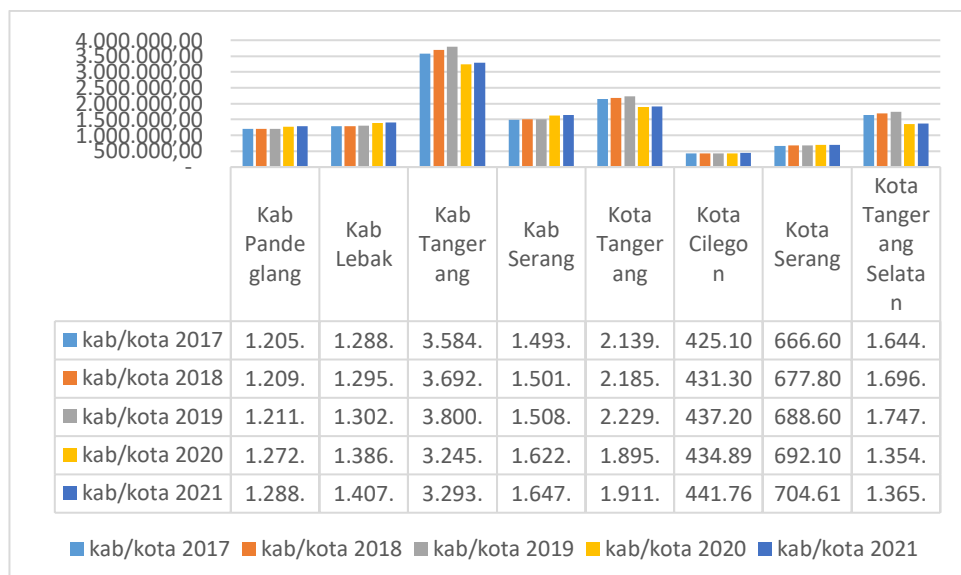
keberlanjutan pemulihan sisi permintaan, terutama akibat perbaikan daya beli masyarakat.

E. Perkembangan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk adalah banyaknya penduduk yang tinggal/menetap di suatu daerah/wilayah tertentu, yang diukur dalam satuan jiwa pertahun. Jumlah penduduk menurut teori Hansen mengenai stagnasi (seculer stagnation) dalam (Devas, 1989) yang menyatakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk justru akan menciptakan atau memperbesar permintaan agregatif.

Perkembangan jumlah penduduk juga dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, karena seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk pada suatu daerah maka dapat berpotensi meningkatkan jumlah wajib pajak sehingga nantinya penerimaan pajak juga akan meningkat. Sehingga dengan bertambahnya jumlah penduduk akan berdampak langsung pada penerimaan pajak daerah (Saputra, Sudjana dan Djudi 2014)

Perkembangan Jumlah Penduduk di kab/kota Provinsi Banten dengan rinci ditampilkan dalam gambar 4.5 sebagai berikut :



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017-2021, Statistik Indonesia

Gambar 4.5 Perkembangan Jumlah Penduduk di Kab/Kota Provinsi Banten

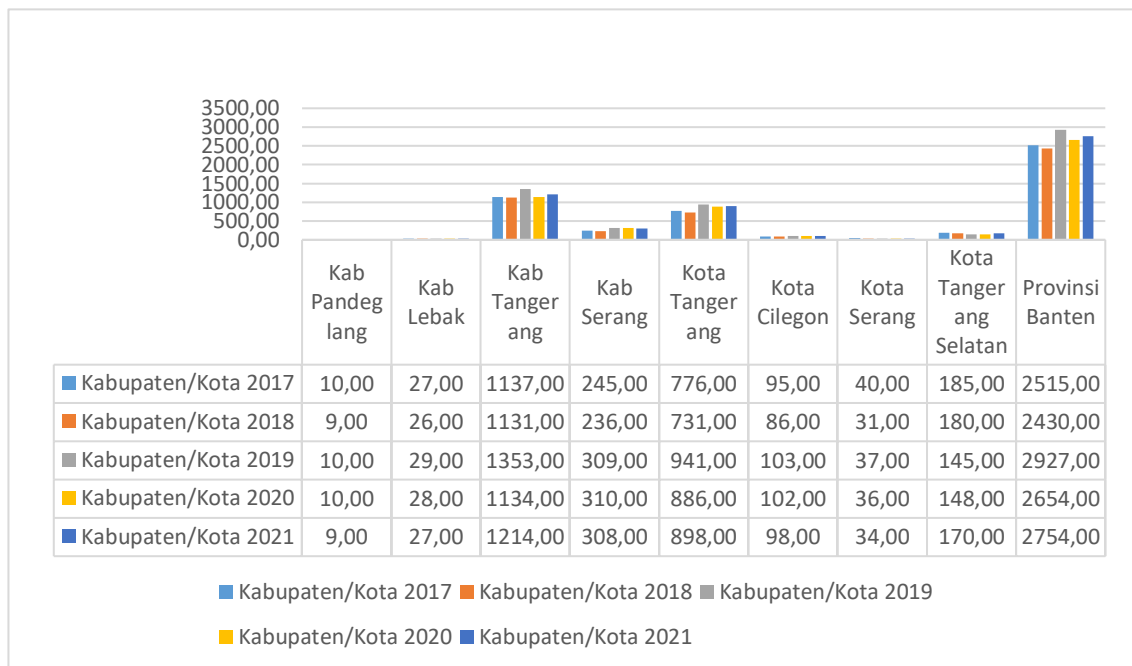
Tahun 2017 - 2021 (ribu jiwa)

Berdasarkan Gambar 4.5 Presentase Jumlah Penduduk terus meningkat setiap tahunnya di kab/kota provinsi banten, yang mana akan membawa dampak positif pada pendapatan daerah yaitu penerimaan pajak.

F. Perkembangan Jumlah Industri

Jumlah industri adalah jumlah seluruh industri kecil dan industri besar yang mana industri merupakan salah satu faktor positif pemicu pertumbuhan ekonomi ketika jumlah industri mulai meningkat tentu perusahaan tersebut perlu memasarkan produk tersebut di tengah masyarakat dengan menggunakan media reklame untuk memperkenalkannya. Menurut (Sutrisno, 2002) jumlah industri berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Penilaian tersebut sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh (Devas dkk, 1989) bahwa sebagian besar pemerintah daerah tingkat II (sekarang Kabupaten/Kota) menarik pajak atas benda papan reklame di daerah. Karena pajak reklame ini cocok untuk sumber penerimaan daerah, karena tempat objek pajak dapat mudah diketahui. Jumlah industri yang menggunakan jasa pemasangan reklame juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Hal ini disebabkan apabila suatu industri yang ingin memasarkan produknya dapat menggunakan atau memasang reklame agar dapat diketahui oleh masyarakat. Hal tersebut dapat menambah jumlah penerimaan pajak itu sendiri. Bertambahnya jumlah industri yang memasang reklame mengakibatkan obyek pajak bertambah luas, sehingga penerimaan daerah pun meningkat (Syuhada Sofian, 1997).

Perkembangan Jumlah Industri di kab/kota Provinsi Banten dengan rinci ditampilkan dalam gambar 4.6 sebagai berikut :



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017-2021, Statistik Indonesia

Gambar 4. 6 Perkembangan jumlah Industri di kab/kota Provinsi Banten Tahun 2017-2021 (Satuan)

Berdasarkan Gambar 4.6 Presentase Jumlah Industri terus meningkat setiap tahunnya di kab/kota provinsi banten, yang mana akan membawa dampak positif pada pendapatan daerah yaitu penerimaan pajak. dilihat bahwa Jumlah Industri dari kab/kota di provinsi Banten mengalami penurunan pada beberapa daerah dan mengalami kenaikan pada beberapa daerah yaitu Kota Tangerang selatan, Kota Tangerang dan Kab Tangerang, yang mana ada kenaikan jumlah industri sedang dan besar hal ini akan membawa pengaruh positif pada Penerimaan Pajak Daerah.

4.2 Hasil Uji Hipotesis

A. Hasil Uji Penelitian Model

Penelitian menggunakan metode analisis regresi berganda dengan panel datayang adalah penggabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data individu (*cross section*). Penelitian ini memiliki 8 *cross section* (8 Kab/kota di

Provinsi Banten) yang berbeda pada periode waktu (*times series*) yang sama yaitu pada tahun 2017 – 2021. Analisis data ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antar variabel independent yaitu pajak daerah, retribusi daerah, produk domestik regional bruto, dan penanaman modal dalam negeri terhadap variabel dependen yaitu Penerimaan pajak daerah pada penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dengan menggunakan program statistik yaitu *Eviews* 8.0.

Hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto, inflasi , Jumlah Penduduk, Jumlah Hotel dan Jumlah industri terhadap Penerimaan Pajak Daerah dapat dianalisis dalam persamaan model berikut:

$$\mathbf{TAX}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \mathbf{TH}_{it} + \beta_2 \mathbf{GRDP}_{it} + \beta_3 \mathbf{INF}_{it} + \beta_4 \mathbf{TP}_{it} + \beta_5 \mathbf{TI}_{it} \quad (4.1)$$

Sebelum mengestimasi data, pengujian metode pemilihan data panel diperlukan untuk memilih atau menyesuaikan model yang akan digunakan, yaitu dengan uji sebagai berikut :

1. Uji Chow

Pada Uji chow untuk mengetahui model yang akan digunakan antara CEM atau FEM untuk mengestimasi data. Pengujian ini dilakukan dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu jika nilai Prob. Cross-section $F < 0,05$ maka model yang dipilih adalah Fixed Effect (FEM). Sebaliknya jika Prob. Cross-section $F > 0,05$ maka model yang dipilih adalah Common Effect (CEM). Hasil pengujian dengan Uji Chow disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.001046	(7,27)	0.0182
Cross-section Chi-square	23.020666	7	0.0017

Sumber: Hasil pengolahan data. (Lampiran 2)

Tabel 4.1 menjelaskan bahwa pada taraf signifikansi 5 persen, diketahui bahwa nilai probabilitas *Cross-section Chi Square* yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,0182. Sehingga berdasarkan uji *Chow*, model terbaik yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

2. Uji Hausman

Pengujian untuk memilih model terbaik dalam mengestimasi data antara FEM dengan REM dilakukan dengan Uji *Hausman*. Hasil Uji *Hausman* dapat dilihat dengan kriteria keputusan yang sama dengan Uji *Chow* yaitu jika nilai Probabilitas < 0,05 maka model yang dipilih adalah *Fixed Effect* (FEM). Sebaliknya jika nilai Probabilitas > 0,05 maka model yang dipilih adalah *Random Effect Model* (REM). Berikut hasil Uji *Hausman* disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.2

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	20.166991	5	0.0012

Sumber: Hasil pengolahan data. (Lampiran 2)

Berdasarkan Tabel 4.2 menjelaskan bahwa pada taraf signifikansi 5 persen, diketahui bahwa nilai probabilitas *Cross-section Fixed* yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,0012. Sehingga berdasarkan uji *Hausman*, model terbaik yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Maka atas hasil yang diperoleh dari Uji *Chow* dan Uji *Hausman*, diputuskan penelitian ini menggunakan model *Fixed Effect Model* (FEM).

B. Hasil Estimasi Model

Estimasi hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah dalam penelitian ini dilakukan melalui metode pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM). Metode tersebut pada data panel digunakan untuk mengatasi galat pada model yang berbeda saling berkorelasi (autokorelasi).

Berikut adalah hasil estimasi regresi data panel *Fixed Effect Model* (FEM) yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.3

Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	30.45343	10.18191	3.274743	0.0029
TH	0.513079	0.021687	23.65875	0.0000
TI	0.000281	0.000136	2.064221	0.0487
TP	-0.084843	0.021608	-3.926548	0.0005
INF	-0.016000	0.040633	-0.393772	0.6968
GDRP	0.197145	0.023977	8.222173	0.0000

Sumber : Hasil Pengolahan Data (Lampiran 2)

Dari hasil Tabel 4.3 tersebut, Persamaan 4.1 dapat diartikan sebagai berikut:

$$\mathbf{TAX_{it} = 30.45343 + 0,513079 TH_{it} + 0,000281 GRDP_{it} + -0,016000 INF_{it}}$$

$$+ -0,084843 TP_{it} + 0,197145 TI_{\epsilon it}$$

Dalam model regresi dengan menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM), hasil regresi data panel dengan program *evIEWS* 8.0 diperoleh koefisien pada tiap-tiap *cross section* untuk setiap Provinsi yang diteliti. Hal ini dapat dilihat dari nilai konstanta pada masing-masing daerah yang diteliti oleh peneliti. Adapun nilai – nilai dari setiap konstanta sebagai berikut :

Tabel 4.4

Nilai Intersep (Konstanta) pada Kab atau Kota di Provinsi Banten

Variable	Koefisien (Ci)	Koefisien C	Ci + C
Kab lebak	19.23543	30,45343	49.688
Kab Serang	-20.98764	30,45343	9.477
Kab Tangerang	37.23543	30,45343	67.694
Kota Cilegon	40.09384	30,45343	70.553
Kota Serang	18.98752	30,45343	49.446
Kota Tangerang	50.34257	30,45343	80.342
Kota Tangerang selatan	121.0987	30,45343	151.558

Sumber : Hasil Pengolahan Data (Lampiran 2)

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel FEM didapatkan bahwa setiap provinsi memiliki nilai konstanta yang berbeda, hal ini menunjukkan bahwa setiap Provinsi memiliki perbedaan faktor – faktor lain yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah pada setiap kab atau kota di provinsi dalam penelitian ini. Tentunya hasil dari konstanta masing – masing Provinsi yang diteliti (Ci) dijumlahkan dengan hasil konstanta umum (C) pada model persamaan panel dengan model *Rendom Effect* (REM) yang menghasilkan nilai konstanta kontribusi (Ci + C). Berdasarkan Tabel tersebut dapat diperoleh hasil estimasi data panel dengan koefisien individu pada masing – masing *cross section* sebagai berikut:

1. Model Analisis dari Penerimaan Pajak Daerah di Kab Lebak

$$\mathbf{TAX_{it} = 49,686 + 0,513079 TH_{it} \ 0,000281 GRDP_{it} + 0,016000}$$

$$\mathbf{INF_{it} - 0,084843 TP_{it} + 0,197145 TI_{it} + \epsilon_{it}}$$

Nilai konstanta Kab Lebak sebesar 49,686 menunjukkan apabila nilai Jumlah Hotel, Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri sama dengan nol maka Penerimaan Pajak Daerah di Kab Lebak pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar 49,686 miliar Rupiah.

2. Model Analisis dari Penerimaan Pajak Daerah di Kab Pandeglang

$$\mathbf{TAX_{it} = 54,0959 + 0,513079 TH_{it} \ 0,000281 GRDP_{it} + 0,016000}$$

$$\mathbf{INF_{it} - 0,084843 TP_{it} + 0,197145 TI_{it} + \epsilon_{it}}$$

Nilai konstanta Provinsi Banten sebesar 54,0959 menunjukkan apabila nilai Jumlah Hotel, Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri sama dengan nol maka Penerimaan Pajak Daerah di Kab Pandeglang pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar 54,0959 miliar Rupiah.

3. Model Analisis dari Penerimaan Pajak Daerah di Kab Serang

$$\mathbf{TAX_{it} = 9,477 + 0,513079 TH_{it} \ 0,000281 GRDP_{it} + 0,016000}$$

$$\mathbf{INF_{it} - 0,084843 TP_{it} + 0,197145 TI_{it} + \epsilon_{it}}$$

Nilai konstanta Kab Serang sebesar 9,477 menunjukkan apabila nilai Jumlah Hotel, Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri sama dengan nol maka Penerimaan Pajak Daerah di Kab Serang pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar

9,477 miliar Rupiah.

4. Model Analisis dari Penerimaan Pajak Daerah di Kab Tangerang

$$\mathbf{TAX_{it} = 67,694 + 0,513079 TH_{it} + 0,000281 GRDP_{it} + 0,016000}$$

$$\mathbf{INF_{it} - 0,084843 TP_{it} + 0,197145 TI_{it} + \epsilon_{it}}$$

Nilai konstanta Kab Tangerang sebesar 67,694 menunjukkan apabila nilai Jumlah Hotel, Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri sama dengan nol maka Penerimaan Pajak Daerah di Kab Tangerang pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar 67,694 miliar Rupiah.

5. Model Analisis dari Penerimaan Pajak Daerah di Kota Cilegon

$$\mathbf{TAX_{it} = 70,553 + 0,513079 TH_{it} + 0,000281 GRDP_{it} + 0,016000}$$

$$\mathbf{INF_{it} - 0,084843 TP_{it} + 0,197145 TI_{it} + \epsilon_{it}}$$

Nilai konstanta Kota Cilegon sebesar 70,553 menunjukkan apabila nilai Jumlah Hotel, Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri sama dengan nol maka Penerimaan Pajak Daerah di Kota Cilegon pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar 70,553 miliar Rupiah.

6. Model Analisis dari Penerimaan Pajak Daerah di Kota Serang

$$\mathbf{TAX_{it} = 49,446 + 0,513079 TH_{it} + 0,000281 GRDP_{it} + 0,016000}$$

$$\mathbf{INF_{it} - 0,084843 TP_{it} + 0,197145 TI_{it} + \epsilon_{it}}$$

Nilai konstanta Kota Serang sebesar 49,446 menunjukkan apabila nilai Jumlah Hotel, Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Jumlah

Penduduk dan Jumlah Industri sama dengan nol maka Penerimaan Pajak Daerah di Kota Serang pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar 49,446 miliar Rupiah.

7. Model Analisis dari Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tangerang

$$\mathbf{TAX_{it} = 80,342 + 0,513079 TH_{it} + 0,000281 GRDP_{it} + 0,016000}$$

$$\mathbf{INF_{it} - 0,084843 TP_{it} + 0,197145 TI_{it} + \epsilon_{it}}$$

Nilai konstanta Kota Tangerang sebesar 80,342 menunjukkan apabila nilai Jumlah Hotel, Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri sama dengan nol maka Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tangerang pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar 80,342 miliar Rupiah.

8. Model Analisis dari Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tangerang Selatan

$$\mathbf{TAX_{it} = 151,558 + 0,513079 TH_{it} + 0,000281 GRDP_{it} + 0,016000}$$

$$\mathbf{INF_{it} - 0,084843 TP_{it} + 0,197145 TI_{it} + C_{it}}$$

Nilai konstanta Kota Tangerang Selatan sebesar 151,558 menunjukkan apabila nilai Jumlah Hotel, Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri sama dengan nol maka Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tangerang Selatan pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar 151,558 miliar Rupiah.

C. Hasil Pengujian Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan untuk melihat distribusi frekuensi dari data yang diamati apakah normal atau tidak (Gujarati & Porter,

2015:127). Dalam penelitian ini menggunakan *Jarque-Bera test (JB test)*

untuk menguji suatu data berdistribusi normal atau tidak, dengan hipotesis :

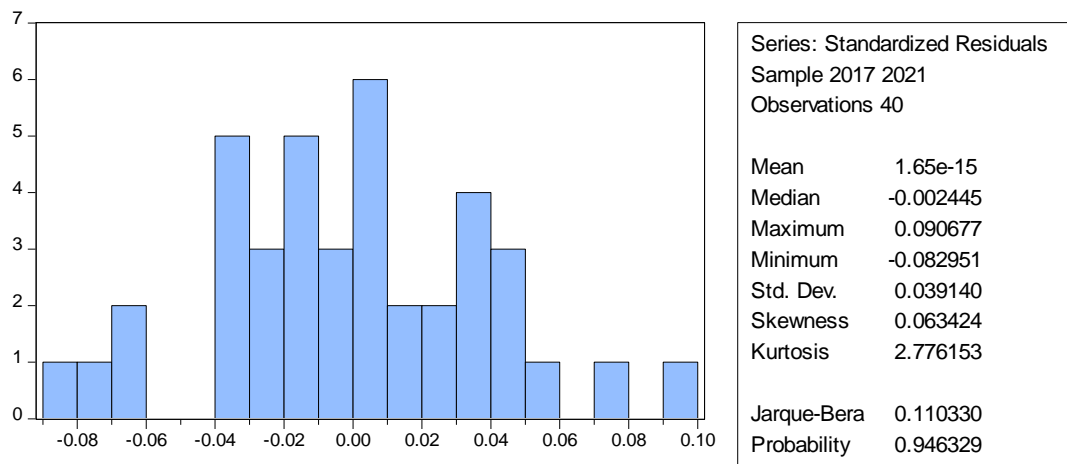
H_0 : data tidak terdistribusi normal

H_1 : data terdistribusi normal

Kriteria pengujian adalah :

– Jika Nilai *JB test* < *Chi-Square Table* dengan (*df*) = 2, maka H_0 ditolak artinya data terdistribusi normal dan lolos uji normalitas.

– Jika nilai *JB test* > *Chi-Square Table* dengan (*df*) = 2, maka H_0 tidak ditolak artinya data tidak terdistribusi normal dan tidak lolos uji normalitas.



Sumber : Hasil Pengolahan Data (Lampiran 4)

Gambar 4.6 Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 4.6 diketahui bahwa nilai *Jarque-Bera* yang dihasilkan telah memenuhi kriteria pengujian dimana apabila nilai *JBtest* < *Chi-Square* dengan (*df*) = 2, maka data terdistribusi normal dan artinya lolos uji normalitas, Terlihat pada output didapati hasil nilai *JBtest* sebesar 0.110330 < *Chi-Square* dengan (*df*) = 2 sebesar 50.99846 Maka diketahui bahwa H_0 ditolak yang artinya data pada penelitian ini terdistribusi normal dan lolos uji normalitas.

D. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menunjukkan adanya hubungan linear diantara variabel independen. Mendeteksinya dapat dilihat dari hasil uji korelasi pada nilai matriks korelasi (*correlation matrix*). Pada uji korelasi, kita menguji multikolinearitas hanya dengan melihat hubungan secara individual antara satu variabel independen dengan satu variabel independen yang lain (Gujarati dan Porter, 2015: 408).

Uji hipotesis statistik:

H₀ : *correlation matrix* > 0,8, Terjadi multikolinearitas

H₁ : *correlation matrix* ≤ 0,8, Tidak terjadi multikolinearitas

Berikut adalah tabel yang menyajikan nilai matriks korelasi untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah multikolinearitas:

Tabel 4.5

Hasil Uji Multikolinearitas

	TH	GDRP	INF	TP	TI
TH	1.000000	-0.011801	0.081476	0.289624	0.102688
GDRP	-0.011801	1.000000	0.245115	-0.167410	0.116065
INF	0.081476	0.245115	1.000000	0.161989	0.005487
TP	0.289624	-0.167410	0.161989	1.000000	-0.166447
TI	0.102688	0.116065	0.005487	-0.166447	1.000000

Sumber: Hasil Pengolahan Data (Lampiran 5)

Berdasarkan Tabel 4.4 didapatkan hasil bahwa koefisien korelasi pada *Correlation Matrix* masing-masing variabel independen adalah < 0,80 maka H₀ ditolak artinya tidak terjadi multikolinearitas atau tidak terdapat hubungan kuat antar variabel independen.

2. Hasil Uji Autokorelasi

Hubungan suatu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lain disebut sebagai autokorelasi (Gujarati & Porter, 2015:85). Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan metode *Durbin Watson* (DW) dengan ketentuan yang dikatakan terbebas dari autokorelasi (Tolak H0) yaitu $DU \leq DW \leq 4-DU$. Adapun hipotesisnya sebagai berikut:

H0 : Terdapat autokorelasi

H1 : Tidak terdapat autokorelasi

Tabel 4.6

Hasil Uji Autokorelasi

Metode Panel FEM	Nilai dU	Nilai dW	Nilai 4-dU	Estimasi Pengujian	Keterangan
<i>No Weight</i>	1,7859	1.7931	2.2141	$1,7859 \leq 1,7931 \leq 2.2141$	Tidak Terdapat Autokorelasi

Sumber: Hasil Pengolahan Data.

Berdasarkan Tabel 4.5 tersebut, untuk mendeteksi autokorelasi menggunakan metode *Durbin-Watson* (DW test) dengan kriteria pengujian $dU \leq dW \leq 4-dU$, harus diperoleh terlebih dahulu nilai DU (batas atas) pada tabel *Durbin-Watson* (DW) dengan jumlah observasi (n) sebesar 40 dan jumlah variabel independent (k) 5 variabel, maka didapatkan nilai du sebesar 1,7859. Pada metode panel FEM *No Weight*, hasil estimasi uji autokorelasi $1.7859 < 1,7931 > 2,2141$, maka H0 ditolak artinya tidak terdapat autokorelasi. masalah autokorelasi dapat teratasi dalam penelitian ini dan terbebas dari autokorelasi. Adapun daerah

pengujian autokorelasi menggunakan metode *Durbin-Watson* dalam penelitian sebagai berikut:

Autokorelasi Positif	Tidak Dapat Disimpulkan	Tidak Ada Autokorelasi	Tidak Dapat Disimpulkan	Autokorelasi Negatif	
0	dL	dU	4-dU	4-dL	4
0	(1,2305)	(1,7859)	(2,2141)	(2,7695)	4

↓
(1.7931)

Gambar 4.7 Hasil Daerah Pengujian Autokorelasi Metode Durbin-Watson

3. Hasil Uji Heterokedestisitas

Dalam melakukan uji heterokedastisitas, penelitian ini menggunakan perbandingan nilai *Chi-Square* hitung dengan *Chi-Square* tabel. Dimana nilai *Chi-Square* hitung didapat dari banyaknya sampel data (n) dikalikan dengan *R-Square* (Gujarati & Porter, 2015:492). Adapun hipotesis uji heterokedastisitas yaitu :

H0 : tidak terjadi heterokedastisitas

H1 : terjadi heterokedastisitas

Untuk mendeteksi apakah terjadi heterokedastisitas dalam model, digunakan kriteria berdasarkan indikator output *views* sebagai berikut:

- Jika *Chi-Square* hitung < *Chi-Square* tabel, maka H0 ditolak artinya tidak terjadi heterokedastisitas.
- Jika *Chi-Square* hitung > *Chi-Square* tabel, maka H0 tidak ditolak artinya terjadi heterokedastisitas.

Tabel 4.7
Hasil Estimasi Uji White – Heterokedastisitas

Jumlah Data (n)	R-Squared	Jumlah Variabel (k)	Chi-Square Hitung (nXR-Squared)	Chi-Squared Table	Keterangan
40	0,967113	5	38,68452	49.8018495	Tidak terjadi Heterokedastisitas

Sumber: Hasil Pengolahan data Panel

Berdasarkan Tabel 4.6 diketahui bahwa nilai *Chi-Square* hitung sebesar (38,68425) < *Chi-Square* tabel sebesar (49.8018495) maka H0 ditolak artinya tidak terjadi heterokedastisitas dan lolos uji heterokedastisitas.

4. Hasil Pengujian Hipotesis Statistik

Pengujian hipotesis statistik merupakan pengujian terhadap hipotesis penelitian yang akan menghasilkan suatu keputusan dalam menolak atau tidak menolak hipotesis penelitian. Jika menolak hipotesis nol atau H0 maka penelitian yang dilakukan secara statistik keputusannya adalah berpengaruh dan jika tidak menolak hipotesis nol atau H0 maka keputusannya hasil penelitian tersebut secara statistik tidak berpengaruh.

5. Hasil Uji Statistik t (Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial (individual) dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam analisis regresi pengaruh Jumlah Hotel, Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri terhadap Perimaan Pajak Daerah secara parsial di Kab/Kota Provinsi Banten yaitu Kab Lebak, Kab Pandeglang, Kab Serang, Kab Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Untuk

tarafsignifikansi $1-\alpha = 95\%$ (0,95), apabila probabilitas kurang dari α maka signifikan. Dengan hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu hipotesis statistik 2 arah maka taraf signifikansi menjadi $1-\alpha = 97,5\%$ % (0,975). Dengan probabilitas $\alpha = 0,025$ dan derajat kebebasan (df) = $n-k = 40-5 = 35$ $t_{tabel} = 2.03010$ atau $-t_{tabel} = - 2.03010$

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Uji T-Statistik

Variabel	T Hitung	T Tabel	Prob.	Hasil Pengujian
Jumlah Hotel	23,65875	2,03010	0.6968	Tolak H_0 , signifikan
Produk Domesti Regional Bruto	8,222173	2,03010	0,0000	Tolak H_0 , signifikan
Inflasi	-0,393772	2,03010	0,0005	Tidak tolak H_0 , tidak signifikan
Jumlah Penduduk	-3.926548	2,03010	0,0000	Tidak tolak H_0 , tidak signifikan
Jumlah Industri	2,064221	2,03010	0,0487	Tolak H_0 , signifikan

Sumber: Hasil Pengolahan data.

Berdasarkan Tabel 4.7 Dapat diuraikan hasil pengujian hipotesis statistik t (Parsial) sebagai berikut :

Pengambilan Keputusan : Jumlah Hotel

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka tolak H_0 . Sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ maka tidak tolak H_0 . Dan apabila Prob. $< (5\% = 0,05)$, maka berpengaruh signifikan. Berdasarkan hasil estimasi nilai t_{hitung} Jumlah Hotel lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar $23,65875 > 2,03010$ dengan nilai Prob. $(0.6968) < (0,05)$, maka H_0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh signifikan dari Jumlah Hotel terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kab/kota Provinsi Banten.

Pengambilan Keputusan : Produk Domestik Regional Bruto

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka tolak H_0 . Sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ maka tidak tolak H_0 . Dan apabila Prob. $< (5\% = 0,05)$, maka berpengaruh signifikan. Berdasarkan hasil estimasi nilai t_{hitung} Produk Domestik Regional Bruto lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar $8,222173 > 2,03010$ dengan nilai Prob. $(0,0000) > (0,05)$, maka H_0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh signifikan dari Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kab/kota Provinsi Banten.

Pengambilan Keputusan : Inflasi

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka tolak H_0 . Sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ maka tidak tolak H_0 . Dan apabila Prob. $< (5\% = 0,05)$, maka berpengaruh signifikan. Berdasarkan hasil estimasi nilai t_{hitung} Inflasi lebih kecil dari t_{tabel} yaitu sebesar $-0,393772 > 2,03010$ dengan nilai Prob. $(0,0005) < (0,05)$, maka H_0 Tidak ditolak. Artinya Tidak terdapat pengaruh signifikan dari Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kab/kota Provinsi Banten.

Pengambilan Keputusan : Jumlah Penduduk

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka tolak H_0 . Sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ maka tidak tolak H_0 . Dan apabila Prob. $< (5\% = 0,05)$, maka berpengaruh signifikan. Berdasarkan hasil estimasi nilai t_{hitung} Jumlah Penduduk lebih kecil dari t_{tabel} yaitu sebesar $-3.926548 > 2,03010$ dengan nilai Prob. $(0,0000) < (0,05)$, maka H_0 Tidak ditolak artinya Tidak terdapat pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kab/kota Provinsi Banten.

Pengambilan Keputusan : Jumlah Industri

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka tolak H_0 . Sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ maka tidak tolak H_0 . Dan apabila Prob. $< (5\% = 0,05)$, maka berpengaruh signifikan. Berdasarkan hasil estimasi nilai t_{hitung}

Jumlah Industri lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar $2,064221 > 2,03010$ dengan nilai Prob. $(0,0487) < (0,05)$, maka H_0 ditolak artinya terdapat pengaruh Jumlah Industri terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kab/kota Provinsi Banten.

Adapun hasil pengelolaan data uji hepotesis statistik simultan (uji F) sebagai berikut:

Tabel 4.9 Hasil Uji F-Statistik

F-hitung	F-tabel	Prob	Hasil Pengujian
66.16701	2.33582	0,00000	Tolak H_0 , Signifikan

Sumber : Hasil Pengolahan data

Jumlah Hotel, produk domestik regional bruto, Inflasi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri terhadap Penerimaan Pajak daerah di Kab/kota Provinsi Banten yang menggunakan $\alpha = 5\%$ $(0,05)$ dengan degree of freedom for mumerator ($dfn = k-1 = 5-1 = 4$) dan degree of freedom for mumerator ($dfd = n-k = 40-5 = 35$) maka diperoleh Ftabel sebesar 2,33582. Jika Fhitung $>$ Ftabel maka tolak H_0 , dari hasil regresi pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, produk domestik regional bruto, dan penanaman modal dalam negeri terhadap pendapatan asli daerah keuangan diperoleh Fstatistik atau F hitung 0,00000. Maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh Jumlah Hotel, produk domestik regional bruto, Inflasi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Penerimaan Pajak daerah di Kab/kota Provinsi Banten dengan asumsi variabel lain dianggap tetap ceteris paribus.

6. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menginformasikan seberapa baik regresi dalam model menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya. Jika nilai R^2 semakin mendekati satu mengartikan variabel-variabel independent memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi variabel dependen. Berikut adalah besarnya koefisien determinasi berdasarkan hasil pengolahan data:

Tabel 4.10 Hasil Uji R²

R-squared	R² X 100
0,967113	97,71%

Sumber : Hasil Pengolahan data

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi tersebut diperoleh nilai Rsquared (R²) sebesar 0,967113 atau 96,71 persen. Hal ini memberi arti bahwa variabel independen (produk domestik regional bruto, inflasi, jumlah penduduk, jumlah hotel dan jumlah industri) mampu menjelaskan variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak Daerah sebesar 0,967113 pada Kab/kota provinsi di Banten yaitu Kota Tangerang, Kab Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab Lebak, Kab Pandeglang, Kab Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, serta sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

4.3 Pembahasan

4.1 Jumlah Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Variabel Jumlah Hotel menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak daerah di Kab/kota Provinsi Banten yaitu Kab Lebak, Kab Pandeglang, Kab Serang, Kab Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, hasil tersebut dibuktikan dengan nilai $t_{\text{statistik}}$ sebesar $23,65875 > (t_{\text{tabel}} = 2,03010)$, nilai probabilitas $t_{\text{statistik}}$ sebesar $0.0000 < 0,05$, dan nilai koefisien sebesar 0.513079, artinya jika Jumlah Hotel meningkat 1 unit maka pendapatan asli daerah di Provinsi Indonesia bagian timur akan naik sebesar 0.513079 persen, Hal tersebut mengartikan bahwa ketika Jumlah Hotel meningkat maka akan berdampak pada kenaikan Penerimaan Pajak daerah di Kab/kota Provinsi Banten. Dalam Hal ini Faktor yang dapat berhubungan dengan peningkatan pajak daerah adalah jumlah hotel. Keberadaan rumah penginapan/hotel yang terdapat di

Kota Yogyakarta memberikan keuntungan bagi Pemerintah Daerah, yaitu melalui penerimaan Pajak Hotel. Adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengenaan pajak kepada pengguna jasa hotel maka dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah di Jawa Timur. Jika jumlah hotel bertambah dengan sendirinya akan dapat meningkatkan penerimaan Pajak daerah melalui pajak hotel (Aliandi dan Handayani, 2013). Lalu hal ini sejalan dengan jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Sumatera Barat Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan untuk menguji pengaruh jumlah hotel, jumlah restoran terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran serta dampaknya pada pendapatan asli daerah di Sumatera Barat (Sanjaya & Wijaya, 2020).

4.2 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Variabel Produk Domestik Regional Bruto menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak daerah di Kab/kota Provinsi Banten yaitu Kab Lebak, Kab Pandeglang, Kab Serang, Kab Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, hasil tersebut dibuktikan dengan nilai $t_{\text{statistik}}$ sebesar $8,222173 > (t_{\text{tabel}} = 2,03010)$, nilai probabilitas $t_{\text{statistik}}$ sebesar $0,0000 > 0,05$, dan nilai koefisien sebesar 0.197145 , artinya jika Produk Domestik Regional Bruto meningkat 1 juta rupiah maka pendapatan Penerimaan Pajak di Kab/kota Provinsi Banten akan naik sebesar 0.197145 persen, artinya ketika Produk Domestik Regional Bruto meningkat maka akan berdampak pada peningkatan Penerimaan Pajak daerah.

Hal ini terjadi karena Produk Domestik Regional Bruto di Kab/kota Provinsi Banten lebih besar mempengaruhi Penerimaan Pajak.. Hal ini sejalan dengan penelitian yaitu PDRB berpengaruh signifikan dan memiliki arah yang positif terhadap penerimaan Pajak Daerah provinsi (Susila & Pradhani, 2022).

Peningkatan PDRB tidak lepas dari dampak meningkatnya aktivitas ekonomi. Seiring dengan meningkatnya standar hidup masyarakat maka golongan

masyarakat yang berpenghasilan tinggi akan semakin meningkat juga, sehingga hal ini dapat menyebabkan peningkatan pada penerimaan pajak daerah. Hal ini dikarenakan sektor-sektor pajak daerah ada dalam PDRB (Shiska dan Nizaruddin: 2009).

4.3 Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Variabel Inflasi menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak daerah di Kab/kota Provinsi Banten yaitu Kab Lebak, Kab Pandeglang, Kab Serang, Kab Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, hasil tersebut dibuktikan dengan nilai $t_{\text{statistik}}$ sebesar $-0,393772 < (t_{\text{tabel}} = 2,03010)$, nilai probabilitas $t_{\text{statistik}}$ sebesar $0.6968 > 0,05$, dan nilai koefisien sebesar -0.016000 , artinya jika Inflasi meningkat 1 persen maka Penerimaan Pajak Daerah di Kab/kota Provinsi Banten akan menurun sebesar -0.016000 persen, artinya ketika Inflasi meningkat maka akan berdampak pada penurunan Penerimaan Pajak Daerah daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Inflasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan PPN (Pajak pertambahan nilai) pada penerimaan pajak daerah hal ini menjelaskan konsumsi masyarakat akan berkurang karena inflasi yang meningkat dan dampaknya pendapatan riil masyarakat akan menurun karena kenaikan pendapatan tidak akan secepat kenaikan harga. Adanya inflasi kemungkinan dapat menurunkan jumlah produk yang akan dibeli karena harga produk yang mengalami kenaikan sehingga penerima PPN tidak mengalami kenaikan yang signifikan (Junianto et al., 2020).

4.4 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Variabel Jumlah Penduduk menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak daerah di Kab/kota Provinsi Banten yaitu Kab Lebak, Kab Pandeglang, Kab Serang, Kab Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, hasil tersebut dibuktikan dengan nilai $t_{\text{statistik}}$ sebesar $-3.926548 > (t_{\text{tabel}} =$

2,03010), nilai probabilitas $t_{\text{statistik}}$ sebesar $0,0005 < 0,05$, dan nilai koefisien sebesar -0.084843 , artinya jika Jumlah Penduduk meningkat 1 orang maka Penerimaan Pajak Daerah di Kab/kota Provinsi Banten akan naik sebesar -0.084843 persen artinya ketika Jumlah Penduduk meningkat maka tidak berdampak pada penerimaan pajak daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Tomohon, yang artinya pertumbuhan jumlah penduduk tidak terlalu berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, mungkin hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya penduduk Kota Tomohon yang belum terdata rapih pada DPPKAD sehingga pajak yang terdata belum mencapai target yang optimal (Mongdong et al., 2018).

4.5 Pengaruh Jumlah Industri terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Variabel Jumlah Industri menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak daerah di Kab/kota Provinsi Banten yaitu Kab Lebak, Kab Pandeglang, Kab Serang, Kab Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, hasil tersebut dibuktikan dengan nilai $t_{\text{statistik}}$ sebesar $2,064221 > (t_{\text{tabel}} = 2,03010)$, nilai probabilitas $t_{\text{statistik}}$ sebesar $0,0487 < 0,05$ dan nilai koefisien sebesar 0.000281 , artinya jika Jumlah Industri meningkat 1 maka Penerimaan Pajak Daerah di Kab/kota Provinsi Banten akan naik sebesar 0.000281 persen artinya ketika Jumlah Industri meningkat maka akan berdampak pada kenaikan penerimaan pajak daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Jumlah industri adalah jumlah unit usaha industri besar. Jumlah industri merupakan salah satu faktor positif pemicu pertumbuhan ekonomi ketika jumlah industri meningkat tentu untuk bisa memasarkan produk tersebut di tengah masyarakat perlu menggunakan media reklame untuk memperkenalkannya. (Miftahol Arifin, 2018) jumlah industri berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

4.6 Pengaruh Jumlah Hotel, Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Secara Simultan

Variable Jumlah Hotel, Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri menunjukkan bahwa terhadap Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah di Kab/kota Provinsi Banten Tahun 2017-2021. Hal ini dibuktikan dengan hasil regresi yang didapat dimana nilai F_{hitung} adalah 66,16701 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2,33582 serta nilai probabilitas 0,0000 kurang dari tingkat kepercayaan sebesar 0,05.

Nilai koefisien determinan pada penelitian ini sebesar 0,967113 atau dikalikan dengan 100 maka sebesar 97,71 (persen). Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah di 8 Kab /kota Provinsi Banten pada tahun 2017-2021 dipengaruhi oleh Jumlah Hotel, Produk Domestik Regional Bruto, Inlasi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri sebesar 97,71 (persen). Sedangkan sisanya sebesar 2,29 (persen) dipengaruhi oleh variable lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Jadi secara simultan variable jumlah hotel, produk domestik regional bruto, inflasi, jumlah penduduk, jumlah industri berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di kab/kota provinsi banten tahun 2017-2021.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh Jumlah Penduduk menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak daerah di Kab/kota Provinsi Banten yaitu (Kab Lebak, Kab Pandeglang, Kab Serang, Kab Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan). tahun 2017 sampai dengan 2021, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan secara parsial

1. Jumlah Hotel tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kab/kota Provinsi Banten tahun 2017 sampai dengan 2021.
2. Produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah daerah di provinsi Indonesia bagian timur tahun 2017 sampai dengan 2021.
3. Inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kab/kota Provinsi Banten tahun 2017 sampai dengan 2021
4. Jumlah Penduduk Tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kab/kota Provinsi Banten tahun 2017 sampai dengan 2021.
5. Jumlah Industri berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kab/kota Provinsi Banten tahun 2017 sampai dengan 2021

B. Kesimpulan secara Simultan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Jumlah Hotel, Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kab/kota Provinsi Banten tahun 2017 sampai dengan 2021.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, adapun beberapa saran yang ingin disampaikan penulis, sebagai berikut:

A. Bagi Pemerintah Daerah, sangat diharapkan dapat lebih mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah atau pembangunan perekonomian, terutama pada sektor Pajak Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto sehingga akan dapat meningkatkan PAD atau menambah penghasilan daerah di Kab/kota Provinsi Banten. Untuk ke depannya yang perlu diperhatikan adalah proses pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Apabila terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, seperti mekanisme penerimaan, mekanisme pemungutan serta database wajib pajak maka hendaknya dapat menjadi perhatian pemerintah daerah, serta pemerintah daerah terus melakukan investasi supaya dapat menampung tenaga kerja, sehingga ekonomi masyarakat semakin baik, pengangguran semakin berkurang, Produk Domestik Regional Bruto semakin meningkat sehingga tentunya dengan harapan akan semakin meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kab/kota Provinsi Banten.

B. Bagi peneliti selanjutnya, penulis menyarankan dapat memberikan variabel-variabel lain seperti variabel – variabel ekonomi seperti Umkm dan Pajak Restaurant.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda, J., Ekonomi dan Bisnis Halaman, S., Kadafi, M., Anggraeni Mersa, N., Septiana Putri, H., Akuntansi, J., Negeri Samarinda, P., Alamat, S., Cipto Mangunkusumo, J., & Gunung Lipan, K. (n.d.). *DETERMINAN PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH KOTA SAMARINDA*.
- Dwi, V., Aliandi, A., & Handayani, H. R. (2013). PENERIMAAN PAJAK HOTEL (STUDI KASUS PADA KOTA YOGYAKARTA). *DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS*, 2(4), 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme>
- Fathiyah, F., & Febrianti, I. (2021). Pengaruh Industri Besar, Nilai Investasi Besar, PDRB Sektor Industri dan Perdagangan Terhadap Penerimaan Pajak Reklame di Kota Jambi Tahun 2011-2020. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 6(2), 427. <https://doi.org/10.33087/jmas.v6i2.305>
- Felix, A., & Watkins, K. (n.d.). *The Impact of an Aging U.S. Population on State Tax Revenues*. www.KansasCityFed.org.
- Haniz, N. F., & Sasana, H. (2013). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA TEGAL. *DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS*, 3(1), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme>
- Immervoll, H. (n.d.). *Immervoll, Herwig The impact of inflation on income tax and social insurance contributions in Europe The Impact of Inflation on Income Tax and Social Insurance Contributions in Europe*. <http://hdl.handle.net/10419/91718>
- Junianto, S., Harimurti, F., & Suharno, S. (2020). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar

Rupiah, Suku Bunga Dan Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah Ii. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(3), 311–321. <https://doi.org/10.33061/jasti.v16i3.4439>

Lumy, D. G., Kindangen, P., & Engka, D. S. M. (2018). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA. In *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* (Vol. 19, Issue 2).

Miftahol Arifin, M. R. andrianingsih. (2018). *PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH INDUSTRI DAN PDRB TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SUMENEPTAHUN 2006 – 2011*. 8.

Mongdong, C. M., Masinambow, V. A. J., Tumangkeng, S., & Samratulangi, U. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Infrastruktur Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tomohon. *Akuntansi Dan Pembangunan*, 18(5), 198–209.

Percetakan, P., Studi, P., Pembangunan Konsentrasi, E., Judul Skripsi, P., & Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Medan, A. (n.d.). *UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN*.

Sania, H., Anggra Yunita, E., Muttaqin, I., Akuntansi, P. S., Studi, P., & Perpajakan, M. (2018). *PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN INFLASI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH: Vol. IX* (Issue 2).

Sanjaya, S., & Wijaya, R. A. (2020). Pengaruh Jumlah Hotel dan Restoran terhadap Penerimaan Pajaknya serta Dampaknya pada Pendapatan Asli Daerah di Sumatra Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 559–

568. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i3.26553>

Suhendro, S., Azis, A. D., & Maulana Zulma, G. W. (2021). Pengaruh Governance terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 535.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.410>

Susila, M. R., & Pradhani, F. A. (2022). Analisis Pengaruh Pdrb Per Kapita Dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Jumlah Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 1(1), 72–87.
<https://doi.org/10.24034/jiaku.v1i1.4996>

Susilo. (n.d.). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah Chintia Ratna Nastiti*.

Lampiran

lampiran 1

data penerimaan pajak daerah (TAX), Jumlah Hotel (TH), Produk Domestik Regional Bruto (GDRB), Inflasi (Inf), Jumlah Penduduk (TP), Jumlah Industri (TI).

KAB/KOTA	TAHUN	TAX	TH	GDRP	INF	TP	TI
Kab_Pandeglang	2017	73.39	180.75	17,866.42	3.98	1205203	10.00
Kab_Pandeglang	2018	86.97	224.61	18,812.93	3.42	1209011	9.00
Kab_Pandeglang	2019	100.74	288.22	19,644.12	3.30	1211909	10.00
Kab_Pandeglang	2020	119.25	104.93	19,541.48	1.45	1272687	10.00
Kab_Pandeglang	2021	156.92	157.34	20,127.75	1.45	1288314	9.00
Kab_Lebak	2017	77.87	202.09	18,683.73	3.97	1288103	27.00
Kab_Lebak	2018	47.07	142.03	19,735.87	3.42	1295810	26.00
Kab_Lebak	2019	54.7	541.23	20,810.48	3.30	1302608	29.00
Kab_Lebak	2020	37.22	162.39	20,610.98	1.45	1386793	28.00
Kab_Lebak	2021	35.00	236.65	21,245.04	1.45	1407857	27.00
Kab_Serang	2017	337.25	458.34	49,154.63	3.98	1493591	245.00
Kab_Serang	2018	379.05	375.79	51,754.31	3.41	1501501	236.00
Kab_Serang	2019	381.73	9.61	54,347.48	3.30	1508397	309.00
Kab_Serang	2020	378.84	3.46	53,055.56	1.45	1622630	310.00
Kab_Serang	2021	331.06	7.45	54,992.52	1.45	1647790	308.00
Kab_Tangerang	2017	1,386.70	459.92	86,964.02	3.96	3584770	1137.00
Kab_Tangerang	2018	1,915.26	503.58	91,011.40	3.42	3692693	1131.00
Kab_Tangerang	2019	2,153.66	6.93	97,129.16	3.20	3800787	1353.00
Kab_Tangerang	2020	1,701.90	3.69	93,482.48	1.45	3245619	1134.00
Kab_Tangerang	2021	2,056.96	7.45	97,809.90	1.45	3293533	1214.00
Kota_Cilegon	2017	455.92	252.75	20,153.02	3.98	425103	95.00
Kota_Cilegon	2018	429.23	221.21	70,502.08	3.41	431305	86.00
Kota_Cilegon	2019	488.73	470.16	74,228.64	3.30	437205	103.00
Kota_Cilegon	2020	564.09	260.47	73,534.47	1.45	434896	102.00
Kota_Cilegon	2021	485.25	293.24	77,071.36	1.45	441761	98.00
Kota_Tangerang	2017	1,566.51	1234.74	101,274.67	3.98	666600	776.00
Kota_Tangerang	2018	1,551.44	1226.66	106,283.61	3.42	677804	731.00
Kota_Tangerang	2019	1,760.35	2140.24	110,556.39	3.30	688603	941.00
Kota_Tangerang	2020	1,364.32	1186.56	102,898.22	1.45	692101	886.00
Kota_Tangerang	2021	1,489.54	1234.23	106,705.26	1.45	704618	898.00
Kota_Serang	2017	117.70	547.98	66,444.52	3.98	666600	40.00

KAB/KOTA	TAHUN	TAX	TH	GDRP	INF	TP	TI
Kota_Serang	2018	128.68	348.87	21,482.09	3.42	677804	31.00
Kota_Serang	2019	143.98	6.82	22,813.09	3.30	688603	37.00
Kota_Serang	2020	139.18	2.83	22,517.98	1.44	692101	36.00
Kota_Serang	2021	140.76	4.32	23,374.08	1.45	704618	34.00
Kota_Tangerang_Selatan	2017	1,330.05	737.78	52,098.55	3.98	1644899	185.00
Kota_Tangerang_Selatan	2018	1,422.94	661.36	55,999.10	3.42	1696308	180.00
Kota_Tangerang_Selatan	2019	1,603.17	302.69	60,137.01	3.30	1747906	145.00
Kota_Tangerang_Selatan	2020	1,345.14	126.38	59,525.50	1.43	1354350	148.00
Kota_Tangerang_Selatan	2021	1,223.11	234.21	62,364.15	1.45	1365688	170.00

Lampiran 2

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.001046	(7,27)	0.0182
Cross-section Chi-square	23.020666	7	0.0017

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: TAX

Method: Panel Least Squares

Date: 02/25/24 Time: 14:05

Sample: 2017 2021

Periods included: 5

Cross-sections included: 8

Total panel (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	30.45343	0.174373	4.934217	0.0000
TH	0.485826	0.023327	20.82657	0.0000
GDRP	0.216505	0.024663	8.778653	0.0000
INF	-0.066155	0.044331	-1.492299	0.1448
TP	-0.055535	0.023118	-2.402226	0.0219
TI	1.27E-05	1.64E-05	0.777796	0.4421
R-squared	0.941526	Mean dependent var		3.907225
Adjusted R-squared	0.932927	S.D. dependent var		0.161861
S.E. of regression	0.041919	Akaike info criterion		-3.368651
Sum squared resid	0.059746	Schwarz criterion		-3.115319
Log likelihood	73.37303	Hannan-Quinn criter.		-3.277054
F-statistic	109.4912	Durbin-Watson stat		1.489975
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 3

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	20.166991	5	0.0012

** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero.

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
TH	0.513079	0.485826	0.000085	0.0031
GDRP	0.197145	0.216505	0.000144	0.1068
INF	-0.016000	-0.066155	0.000259	0.0018
TP	-0.084843	-0.055535	0.000088	0.0018
TI	0.000281	0.000013	0.000000	0.0476

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: TAX
Method: Panel Least Squares
Date: 02/25/24 Time: 14:05
Sample: 2017 2021
Periods included: 5
Cross-sections included: 8
Total panel (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	30.45343	0.181291	3.274743	0.0029
TH	0.513079	0.021687	23.65875	0.0000
GDRP	0.197145	0.023977	8.222173	0.0000
INF	-0.016000	0.040633	-0.393772	0.6968
TP	-0.084843	0.021608	-3.926548	0.0005
TI	0.000281	0.000136	2.064221	0.0487

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.967113	Mean dependent var	3.907225
Adjusted R-squared	0.952497	S.D. dependent var	0.161861
S.E. of regression	0.035278	Akaike info criterion	-3.594168
Sum squared resid	0.033602	Schwarz criterion	-3.045282
Log likelihood	84.88336	Hannan-Quinn criter.	-3.395708
F-statistic	66.16701	Durbin-Watson stat	2.347391
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 4: Estimasi Model Panel

Dependent Variable: TAX?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 02/25/24 Time: 14:16
 Sample: 1 5
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 8
 Total pool (balanced) observations: 40

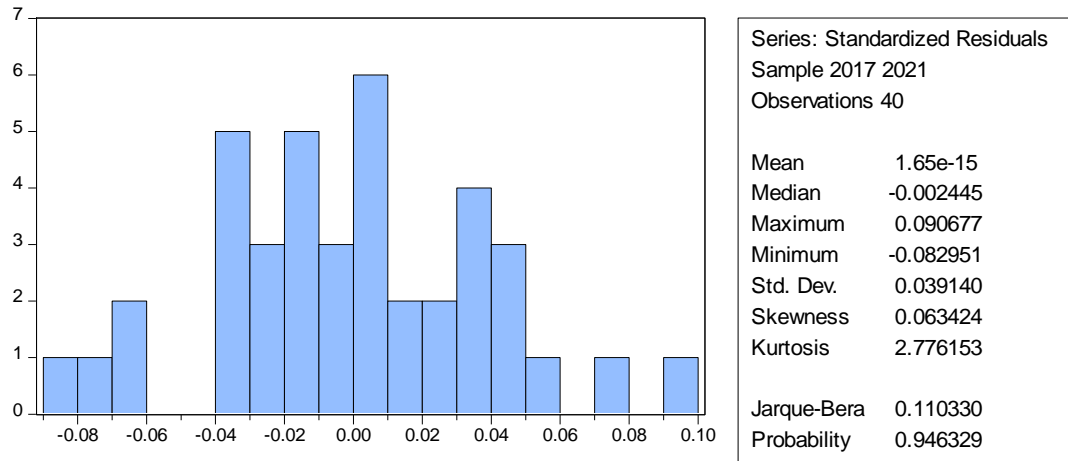
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	30.45343	0.181291	3.274743	0.0029
TH?	0.513079	0.021687	23.65875	0.0000
GDRP?	0.197145	0.023977	8.222173	0.0000
INF?	-0.016000	0.040633	-0.393772	0.6968
TP?	-0.084843	0.021608	-3.926548	0.0005
TI?	0.000281	0.000136	2.064221	0.0487
Fixed Effects (Cross)				
_KAB_LEBAK--C	19.23543			
_KAB_PANDEGLANG--C	23.34254			
_KAB_SERANG--C	0.003295			
_KAB_TANGERANG--C	-20.98764			
_KOTA_CILEGON--C	37.23453			
_KOTA_SERANG--C	40.09384			
_KOTA_TANGERANG--C	18.98752			
_KOTA_TANGERANG_SELATAN--C	121.0987			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.967113	Mean dependent var	3.907225
Adjusted R-squared	0.952497	S.D. dependent var	0.161861
S.E. of regression	0.035278	Akaike info criterion	-3.594168
Sum squared resid	0.033602	Schwarz criterion	-3.045282
Log likelihood	84.88336	Hannan-Quinn criter.	-3.395708
F-statistic	66.16701	Durbin-Watson stat	2.347391
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 5 : Uji Normalitas



Lampiran 6 : Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

	TH	GDRP	INF	TP	TI
TH	1.000000	-0.011801	0.081476	0.289624	0.102688
GDRP	-0.011801	1.000000	0.245115	-0.167410	0.116065
INF	0.081476	0.245115	1.000000	0.161989	0.005487
TP	0.289624	-0.167410	0.161989	1.000000	-0.166447
TI	0.102688	0.116065	0.005487	-0.166447	1.000000

LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Adam Rijaldi Abdilah	
NIM	: 5553170076	
Tempat/Tanggal Lahir	: Tangerang, 20 Juni 1998	
Jenis Kelamin	: Laki-Laki	
Agama	: Islam	
Email	: adamboroh@gmail.com	
Nama Ayah	: Rizal Zakaria Latif	
Nama Ibu	: Hanah Hasanah	
Anak Ke-	: (3) Tiga	
Alamat	: Cluster Taman Kenari 2 N0.22, Kota Tangerang	

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : MI Al-Mabruroh
SMP : SMP Al-Husna Kota Tangerang
SMA : SMK Kartika 1-1 Kota Padang